

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**KAMBOJA PADA MASA PEMERINTAHAN POL POT  
TAHUN 1975-1979**

Disusun Untuk  
Memenuhi Persyaratan Mendapatkan  
Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh:

Ratih Nuke Prasanti

001314053

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

2004

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**SKRIPSI**

**KAMBOJA PADA MASA PEMERINTAHAN POL POT TAHUN 1975-1979**

Oleh :

**Ratih Nuke Prasanti**  
**NIM :001314053**

Telah disetujui oleh:

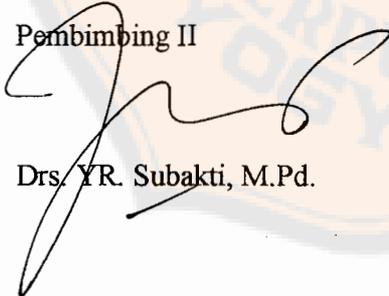
Pembimbing I



Drs. AK. Wiharyanto, MM.

Tanggal 2 Agustus 2004

Pembimbing II



Drs. YR. Subakti, M.Pd.

Tanggal 2 Agustus 2004

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**SKRIPSI**

**KAMBOJA PADA MASA PEMERINTAHAN POL POT TAHUN 1975-1979**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

**Ratih Nuke Prasanti**

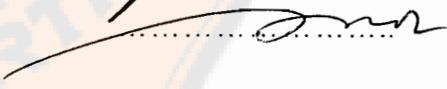
**NIM: 001314053**

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 16 Agustus 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Panitia Penguji**

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo, JR	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Drs. AK. Wiharyanto, MM	
Anggota	Drs. YR. Subakti, M.Pd	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo, JR	

Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Mengetahui, Dekan FKIP



Dr. A.M. Slamet Suwandi, M.Pd

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Penulis



Ratih Nuke Prasanti



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

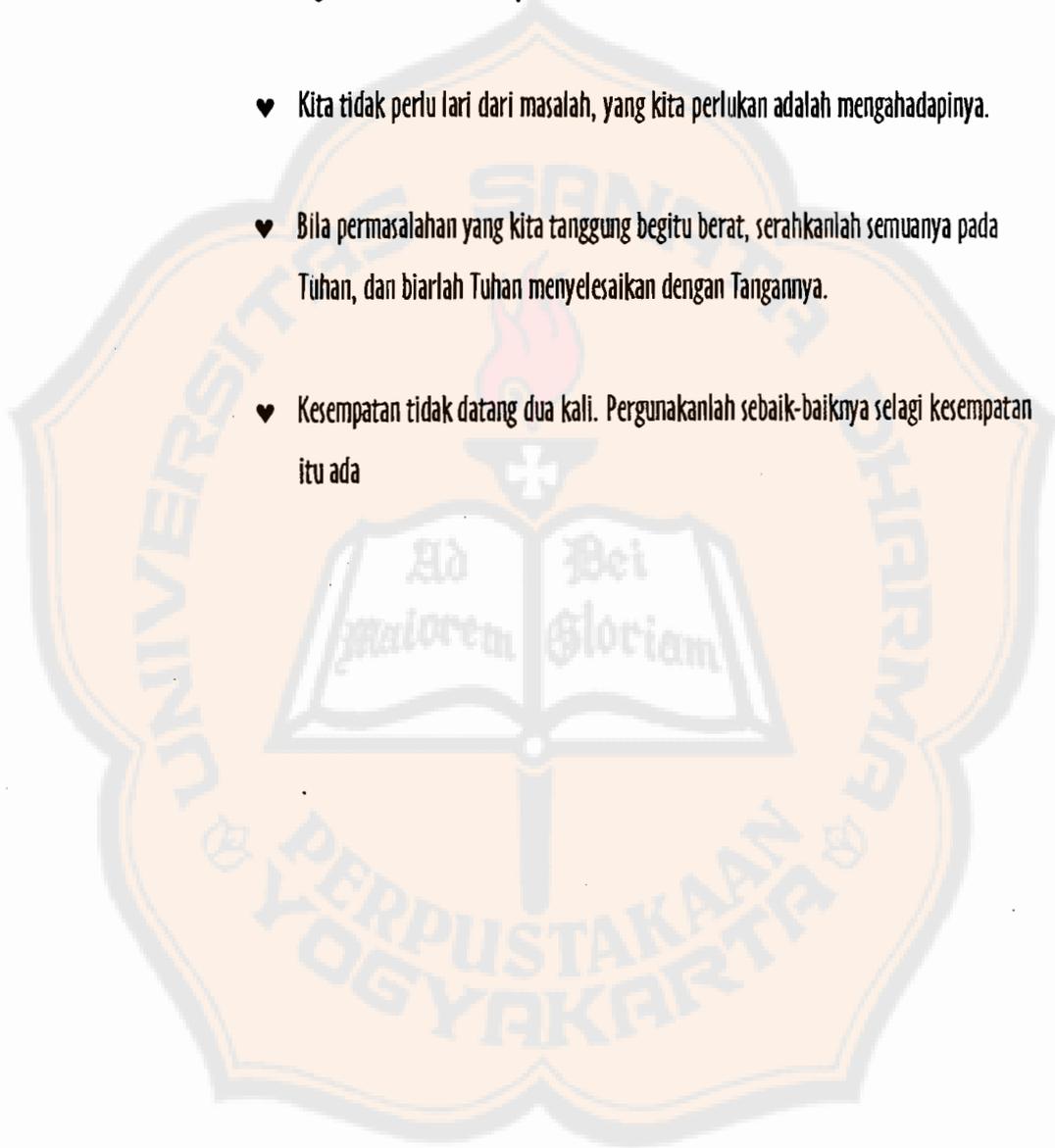
- ♥ Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan baik material dan spiritual.
- ♥ Kakakku Galih tetap "Chayo" dan adikku Bintang cepet Gede.
- ♥ Seseorang yang telah memberikan inspirasi tersendiri bagi penulis. **BENY CS...! ♥♥♥**
- ♥ Teman-teman terkasih Suprihati "Doel", Roswita "Cemplux" dan Mardi "Wedhus".  
*Persehan Dheh!!!*



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

- ♥ Sebelum menyerah kita tidak pernah gagal. Kegagalan hanyalah bagi mereka yang menyerah.
- ♥ Segala sesuatu ada masanya.
- ♥ Kita tidak perlu lari dari masalah, yang kita perlukan adalah menghadapinya.
- ♥ Bila permasalahan yang kita tanggung begitu berat, serahkanlah semuanya pada Tuhan, dan biarlah Tuhan menyelesaikan dengan Tangannya.
- ♥ Kesempatan tidak datang dua kali. Pergunakanlah sebaik-baiknya selagi kesempatan itu ada



ABSTRACT

CAMBODIA ON POL POT REGIMES 1975-1979

This academic writing is written in purpose to describe and analyze the occurrence process of Pol Pot's regime in Cambodia. This writing is to describe the efforts taken by Pol Pot in achieving the Cambodian first leader and also to analyze the end of Pol Pot's regime in Cambodia.

The method used in this writing is a historic method that lead to a descriptive analysis method. This means that the writing is intended to describe and elaborate the historical events based on the causality, conditional factors, determination of time and space and also to analyze the facts wich is related to the other events.

The result of this academic writing consisted of the elaboration of the problems from the thesis that is Pol Pot is a Cambodian leader who achieved his position by carrying out a coup d' etat to the Lon Nol government. To fulfill his ambition, Pol Pot was assisted by the Red Khmer, the Cambodian communist party, and another communist country. Then, he arranged his government cabinets which mostly consisted of his close friends and relatives. Since Pol Pot and his cabinets were the loyal followers of Mao Zedong philosophy, he used the Mao's philosophy as the institution to establish the communist society in Cambodia. Pol Pot then put away the other communist countries who helped him to achieve his position and cooperate only with China. Pol Pot was known as a dictator who managed his government severely. Referring to his Mao's philosophy, Pol Pot had committed genocide that had taken 3 millions Cambodian life, created a society without money, eliminating cities, eliminating religion and adored war so much. This situation had stimulated many reactions from his own people and foreign countries such as America and England. In late 1978, Vietnam invaded Cambodia. The Cambodian army was easily defeated, and Pol Pot fled to the Thai border. In January 1979, Vietnam installed a puppet government under Heng Samrin, composed of Khmer Rouge who had fled to Vietnam to avoid the purges.

## ABSTRAK

### KAMBOJA PADA MASA PEMERINTAHAN POL POT TAHUN 1975-1979

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan Kamboja, untuk mendeskripsikan usaha-usaha yang diambil oleh Pol Pot dalam menjalankan pemerintahannya, selain itu penulisan ini bertujuan untuk menganalisa mengenai akhir pemerintahan Pol Pot.

Metode yang digunakan didalam penulisan ini yaitu menggunakan metode sejarah yang sifatnya deskriptif analisis, di mana penulisannya bersifat menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan lengkap berbagai [peristiwa sejarah yang berdasarkan kausalitas, faktor-faktor kondisional, determinasi ruang dan waktu, disamping juga menganalisa fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya dengan peristiwa lain.

Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini yaitu berisikan mengenai pembahasan dari permasalahan dan berorientasikan pada tujuan penulisan yaitu Pol Pot merupakan pemimpin Kamboja yang memperoleh kursi pemerintahan dengan jalan kudeta dari pemerintahan Lon Nol. Di dalam aksinya itu Pol Pot dibantu oleh Khmer Merah sebagai partai dan organisasi komunis yang ada di Kamboja, kudeta yang dilakukan juga mendapat bantuan dari negara-negara komunis lainnya. Setelah berhasil duduk dalam kursi pemerintahan, Pol Pot kemudian merancang susunan pemerintahan yang di dalamnya berisikan teman-teman dan kerabat dekatnya. Dalam menjalankan pemerintahannya itu, ia menggunakan ajaran-ajaran Mao Zedong, karena Pol Pot dan teman-temannya merupakan pengikut ajaran Mao yang setia, sehingga ajarannya dijadikan sebagai dasar terbentuknya masyarakat komunis Kamboja. Pol Pot kemudian negara-negara komunis yang membantunya dan hanya mau bekerja sama dengan Cina. Pol Pot pun menjalankan usaha-usaha untuk mempertahankan pemerintahannya yang semuanya itu berorientasikan pada ajaran Mao, yaitu melaksanakan pembunuhan massal (genocide), menciptakan masyarakat yang tanpa uang tetapi dengan kerja paksa, penghapusan kota-kota, menghapuskan agama, dan memuji perang. Usaha atau langkah yang diambilnya itu telah merenggut nyawa rakyat Kamboja sebanyak tiga juta penduduk. Pol Pot telah menjalankan pemerintahannya dengan sangat kejam dan diktaktor, keadaan Kamboja itu telah menimbulkan banyak reaksi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam berasal dari rakyatnya yang memberontak yang dipimpin oleh Heng Samrin, pemberontakan ini dibantu oleh Vietnam, sedangkan dari luar negeri berasal dari negara-negara tetangga, juga dari Amerika Serikat dan Inggris. Sampai pada akhirnya Vietnam menginvasi Kamboja pada akhir tahun 1978 sampai awal tahun 1979 yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Pol Pot. Heng Samrin pun kemudian dapat duduk sebagai Presiden Kamboja dan mengakhiri kekejaman Khmer Merah.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kamboja Pada Masa Pemerintahan Pol Pot Tahun 1975-1979".

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis dan segenap keluarga besar yang telah memberi dorongan material maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Drs. S. Adisusilo, JR. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Drs. AK Wiharyanto, MM. Sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai akhir penulisan.
5. Bapak Y.R. Subakti, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan, membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Karyawan dan karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.
9. Teman-teman Pendidikan Sejarah satu angkatan, terimakasih atas persahabatan, kebersamaannya dan kerjasamanya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan segala hal yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca dan bagi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Yogyakarta 2004-06-30

penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Landasan Teori.....	15
G. Metodologi Penulisan.....	43
H. Metode Dan Pendekatan.....	44
I. Sistematika Penulisan.....	50
BAB II PROSES MUNCULNYA POL POT DALAM PEMERINTAHAN DI KAMBOJA.....	52
A. Situasi Kamboja Menjelang Munculnya Pol Pot.....	52

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Pengaruh Komunis Cina Terhadap Pol Pot.....	58
BAB III USAHA-USAHA YANG DIJALANKAN POL POT DALAM PEMERINTAHAN DI KAMBOJA.....	67
A. Kebijakan-Kebijakan Pol Pot .....	67
B. Langkah-Langkah Pol Pot dalam Melaksanakan Cita-Citanya.....	71
1. Melaksanakan Pembunuhan Secara Massal.....	71
2. Menciptakan Suatu Masyarakat Tnpa Uang Tetapi Dengan Kerja Paksa.....	77
3. Penghapusan Kota-Kota.....	81
4. Menghapuskan Agama.....	84
5. Memuji Perang.....	87
BAB IV AKHIR PEMERINTAHAN POL POT DI KAMBOJA.....	92
A. Sifat Pemerintahan Pol Pot.....	92
B. Reaksi Dari Luar Negeri.....	93
C. Reaksi Dari Dalam Negeri.....	96
BAB V PENUTUP.....	105
A Kesimpulan.....	105
B Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kamboja yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan beribu kota di Pnompenh, terkenal dengan negeri Pagoda atau Angkor. Angkor yang terkenal di Kamboja yaitu Angkor Wat, yang juga merupakan salah satu keajaiban dunia. Angkor Wat merupakan “Candi Borobudur”-nya bangsa Kamboja, sehingga sekaligus sebagai kebanggaan bangsa tersebut. Pada tahun 1970-an, lima puluh persen hutan di negeri Kamboja masih berupa hutan yang perawan. Negeri ini sebenarnya cukup makmur, karena Kamboja banyak menghasilkan komoditi yang cukup penting di perdagangan internasional. Bahan-bahan komoditi tersebut berupa karet, kapuk, minyak kelapa sawit, bahan-bahan tambang seperti emas, mangan dan minyak. Kerajinan tangan yang indah termasuk sutera, juga terkenal di Kamboja sejak itu. Namun sejak perang saudara mulai tahun 1975, semuanya itu menjadi terlantar. Karena sejak itu Kamboja terlibat di dalam gejolak politik, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>1)</sup>

Di samping itu, Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang bisa dikatakan rawan konflik. Sejak dahulu Kamboja sangat sering terjadi atau terlibat berbagai konflik politik, di mana konflik tersebut sangat membahayakan stabilitas keamanan di wilayah atau kawasan

---

<sup>1)</sup> *Sinar Harapan*, 14 Juni 1979.

umumnya. Selain itu juga telah membuat bangsa Kamboja menjadi terpecah belah, sehingga sering timbul krisis kepercayaan pada pemimpin mereka dan akhirnya rakyat Kamboja banyak yang meninggalkan tanah airnya.

Konflik-konflik politik yang terdapat di Kamboja tersebut sebagian besar merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat dari sejak Kamboja merdeka pada tahun 1947 dari penjajahan Perancis dengan pemerintahannya yang bersifat pemerintahan konstitusional

Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Kamboja ternyata tidak langsung membawa suatu kesejahteraan yang merata bagi rakyat Kamboja, tetapi hal tersebut malah bersifat sebaliknya, yaitu kemerdekaan yang telah diperoleh tersebut ternyata telah membawa kesengsaraan bagi rakyat Kamboja. Kesengsaraan tersebut timbul sebagai akibat seringnya terjadi konflik politik di dalam negeri yang sebagian besar lebih mengarah kepada pertumpahan darah, sehingga korban dari adanya konflik politik di Kamboja adalah rakyat Kamboja itu sendiri yang menanggung akibat dari seringnya terjadi perebutan kekuasaan atas kursi kepemimpinan di Kamboja.

Sebenarnya konflik-konflik politik di Kamboja mulai muncul setelah Kamboja memperoleh kemerdekaannya, yaitu tahun 1947. Pada waktu itu Pangeran Norodom Sihanouk dinobatkan sebagai raja Kamboja pada usia 18 tahun. Setelah Kamboja memperoleh kemerdekaannya, bangsa Barat terutama Perancis masih menanamkan pengaruhnya di Kamboja, karena Perancis masih mempunyai kepentingan yang banyak di negeri Kamboja. Hal tersebut

dikarenakan kemerdekaan Kamboja pada waktu itu masih berada di bawah pengaruh lingkungan Uni-Perancis. Oleh karena itu, Pangeran Sihanouk selalu terancam di dalam memimpin dan mempersatukan rakyat Kamboja, karena pihak Perancis selalu melakukan tekanan-tekanan kepada Pangeran Sihanouk, baik tekanan yang bersifat diplomasi, politik ataupun dengan senjata dan kekerasan

Akibat adanya tekanan yang sangat besar dari pihak Perancis menyebabkan Pangeran Sihanouk pergi melarikan diri ke Muangthai, kemudian kembali lagi ke Kamboja dan ia segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Kamboja secara penuh, hal tersebut dilakukannya dengan berbagai cara, baik melalui perjuangan diplomasi maupun dengan perlawanan senjata, karena Pangeran Sihanouk juga masih memiliki pengikut-pengikut yang setia dan bertindak sebagai pasukannya.

Pada tahun 1954, usaha-usaha yang dilakukan oleh Pangeran Sihanouk ternyata membuahkan hasil. Ini berarti perlawanan yang dilakukannya mengalami keberhasilan, sebab Kamboja pada tahun itu pula telah berhasil memperoleh kemerdekaan secara penuh.

Pada tahun 1955 Pangeran Norodom Sihanouk menyerahkan tahta kepemimpinan kepada ayahnya yang bernama Norodom Sumaramit. Pada perkembangan selanjutnya, Sihanouk kemudian mendirikan sebuah partai perkumpulan sosialis kerakyatan atau dalam bahasa Kamboja disebut sebagai "Sangkum Reastri Niyum". Satu tahun kemudian timbulah pertentangan, yang

terjadi antara Norodom Sihanouk dengan lawan politiknya yang bernama So Ngok Thank, Sihanouk dituduh bahwa kegiatan-kegiatan atau kebijaksanaan politiknya lebih condong kepada Blok Barat.

Pada tahun 1960, Ayah Norodom Sihanouk atau Norodom Sumaramit meninggal, dan Norodom Sihanouk diangkat menjadi kepala negara tetapi tanpa gelar raja. Selama menjadi kepala negara Kamboja, Sihanouk ternyata banyak sekali mengalami rong-rongan atau tekanan-tekanan yang berasal dari lawan-lawan politiknya.

Setelah selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara Kamboja, Norodom Sihanouk pada tanggal 18 Maret 1970 digulingkan oleh perdana menteri sendiri yang bernama Jenderal Lon Nol, yang sebelumnya telah dipecat dan digantikan oleh San Sann. Pada saat terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan secara paksa atau dengan cara kudeta ini, Norodom Sihanouk sedang berada di Moscow. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan tersebut dan juga telah mengancam keselamatan bangsa maupun dirinya, maka Sihanouk kemudian mencari suaka atau mencari dukungan ke Cina untuk membantu menstabilkan keadaan negara Kamboja yang sedang mengalami kegoncangan akibat adanya kudeta dari Jenderal Lon Nol.

Selama Kamboja berada di bawah kekuasaan dan pemerintahan Jenderal Lon Nol, Sihanouk berada di Cina, dan ternyata pemerintahan ini tidak berlangsung lama, karena Lon Nol dalam menjalankan pemerintahan di Kamboja

juga banyak mengalami rong-rongan atau tekanan yang berasal dari lawan-lawan politiknya yang berusaha menggulingkan pemerintahan Lon Nol.

Pada waktu terjadi perang saudara di Vietnam, pemerintahan Sihanouk lebih condong kearah Vietnam Utara dimana Vietnam Utara tersebut memiliki haluan pemerintahan yang bersifat komunis. Hal tersebut dikarenakan Sihanouk terbawa sikap anti terhadap musuh lama yaitu kerajaan Annam dibawah Bao Dai yang berada di wilayah Vietnam Selatan dan pernah menjajah sebagian wilayah kerajaan Kamboja. Karena pemihakannya pada Vietnam Utara, maka Sihanouk mengeluarkan kebijakannya mengenai diperbolehkannya pasukan Vietnam Utara tersebut untuk berada di wilayah Kamboja. Namun kebijakan Sihanouk tersebut disalahgunakan oleh Vietnam Utara, karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dimanfaatkan oleh Vietnam Utara untuk menyerang Vietnam Selatan, dimana serangan yang dilancarkan tersebut melalui wilayah Kamboja. Keadaan yang demikian ini membuat rakyat Kamboja merasa khawatir kalau-kalau wilayah di Kamboja ikut diserang oleh kedua negara yang sedang terlibat perang saudara tersebut. Melihat keadaan yang demikian gawatnya itu membuat Sihanouk merasa tidak dapat mengatasinya, maka ia pun pergi ke Eropa untuk beristirahat dan dengan segera mencari jalan keluarnya agar negaranya terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh kedua negara yang sedang berperang tersebut.

Sementara Sihanouk tidak berada di Kamboja, maka urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara Kamboja di percayakan kepada

Jendral Lon Nol yang pada waktu itu bertindak sebagai kepala pemerintahan di Kamboja. Tetapi kepercayaan Sihanouk terhadap Lon Nol untuk memimpin pemerintahan tersebut disalahgunakan, Lon Nol malah mengambil kesempatan dalam hal ini ia memanfaatkan posisinya tersebut untuk melakukan kudeta atas pemerintahan Sihanouk. Di dalam aksinya yaitu menggulingkan pemerintahan Sihanouk, Lon Nol ternyata mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan Vietnam Selatan, yang dilakukannya pada tanggal 18 Maret 1970. kedua belah pihak tersebut memberi bantuan terhadap Lon Nol dikarenakan adanya kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Sihanouk mengenai pasukan Vietnam Utara yang diperbolehkan untuk berada di dalam wilayah Kamboja, yang menandakan adanya dukungan Sihanouk terhadap pemerintah Vietnam Utara.

Pada akhirnya pemerintahan Sihanouk digantikan oleh pemerintahan Lon Nol. Pada masa pemerintahan Lon Nol ini ternyata keadaan ataupun situasi politik dan negeri Kamboja pada umumnya tidak lebih baik dari sebelumnya, bahkan keberadaan Lon Nol sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Kamboja tersebut malah membuat situasi di negara itu menjadi tambah kacau. Hal tersebut dikarenakan sewaktu Lon Nol menjabat sebagai presiden, ia mendapatkan banyak tentangan karena tidak setuju atas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Lon Nol. Bahkan Lon Nol sendiri telah dinilai terlalu bertindak sewenang-wenang di dalam memimpin pemerintahan negara Kamboja

Kesewenangan itu terlebih lagi dilakukannya pada golongan orang-orang Vietnam yang minoritas jumlahnya di Kamboja.

Setelah Jendral Lon Nol duduk sebagai orang nomor satu di Kamboja, ia pun melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemerintahannya. Jenderal Lon Nol merupakan orang yang anti terhadap pengaruh komunis, oleh sebab itu Amerika Serikat mau membantunya dalam menggulingkan pemerintahan Sihanouk. Maka setelah Jenderal Lon Nol duduk dalam kursi pemerintahan, terbukalah pangkalan militer untuk Amerika Serikat, sebab dipihak lain Amerika Serikat mempunyai kepentingan dan tujuan terhadap Kamboja, maka dengan membantu Jenderal Lon Nol untuk melakukan kudeta pemerintahan yang ada sebelumnya, kepentingannya tersebut dapat tercapai. Amerika Serikat tersebut membuka pangkalan militer di Kamboja dengan tujuan lain yaitu memukul dan melakukan penyerangan terhadap Vietcong dan Vietnam Utara, agar Amerika Serikat dapat dengan mudah melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Vietcong and Vietnam Utara yang mempunyai haluan komunis di pemerintahan dan negaranya, dan penyerangan tersebut dilakukannya melalui wilayah Kamboja.

Di dalam menjalankan pemerintahannya, Jenderal Lon Nol tidak dapat menjalankannya dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tekanan yang ia dapatkan di dalam memimpin negara tersebut. Tekanan-tekanan atau rong-rongan yang diperolehnya tersebut berasal dari lawan-lawan politiknya yang berusaha untuk menjatuhkannya dari kursi pemerintahan. Lawan-lawan

politiknya tersebut merupakan orang-orang yang ingin berusaha menguasai Kamboja seutuhnya. Mereka tersebut merupakan kelompok Khmer Rouge atau bisa juga berarti Kamboja Merah.

Khmer Merah atau Khmer Rouge tersebut merupakan kelompok komunis yang dipimpin oleh Khieu Sampan bersama-sama dengan Pol Pot dan Ieng Sary. Di mana Ketiga orang tersebut terus menerus melakukan tekanan dan berusaha untuk menggerogoti kekuasaan Lon Nol. Pol Pot sebelum masuk menjadi anggota Khmer Rouge, ia merupakan seorang mahasiswa yang menuntut ilmu di Paris, Perancis. Setelah ia menyelesaikan studinya tersebut Pol Pot pun kembali ke Kamboja dan ia pun tertarik pada Khmer Rouge tersebut. Sehingga hal tersebut membuat ia bergabung dengan anggota Khmer Rouge atau Khmer Merah. Di dalam Khmer Merah ia pun menjadi anggota yang sangat berpengaruh, sehingga akhirnya kepemimpinan Khmer Merah tersebut didominasi oleh tiga orang di mana salah satunya adalah Pol Pot sendiri, di samping Khieu Sampan dan Ieng sary.

Dalam perkembangannya Khmer Merah tidak hanya melakukan tekanan-tekanan saja pada pemerintahan Lon Nol. Sebab Khmer Merah lalu melakukan serbuan atau penyerangan-penyerangan terhadap pemerintahan Lon Nol. Pada bulan april 1975 Khmer Merah melakukan serbuan terhadap pemerintahan Lon Nol, serangan tersebut didukung oleh Vietcong, Vietnam Utara, Uni Soviet dan RRC. Bantuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut kepada Khmer Merah itu merupakan bantuan yang sifatnya besar-besaran,

bantuan tersebut berupa bantuan persenjataan dan amunisi untuk keperluan penyerbuan terhadap pemerintahan yang berlangsung. Negara-negara tersebut mau memberikan bantuan kepada Khmer Merah dengan tujuan untuk menumbangkan pemerintahan Lon Nol. Ada pun pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada Khmer Merah itu merupakan kelompok yang menganut paham komunis, guna menumbangkan pemerintahan yang sifatnya anti terhadap komunis.

Terlihatlah di sini bahwa solidaritas antar negara-negara komunis sangat besar, sehingga tercipta suatu hubungan yang saling membantu untuk mempertahankan dan menyebarkan pengaruhnya tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya Perang Dingin yaitu perang perebutan pengaruh yang dilakukan antara paham liberal kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dengan paham sosialis komunis yang berada di bawah pimpinan negara Uni Soviet. Mereka sama-sama melakukan aksi penyebaran pengaruh diseluruh dunia, sehingga terkesan bahwa dunia terbagi dua, di bawah pengaruh dua negara adi kuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dengan adanya penyerbuan yang dilakukan oleh Khmer Merah dengan bantuan dari negara-negara lain yang juga berhaluan komunis tersebut, maka pemerintahan yang ada pada waktu itu di bawah kekuasaan Jenderal Lon Nol dapat digulingkan, bahkan Lon Nol sendiri melarikan diri ke Amerika Serikat. Pada akhirnya penggulingan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Khmer Merah tersebut berhasil dilakukan, maka kursi pemerintahan di Kamboja

di duduki oleh Khmer Merah dengan Pol Pot sebagai Perdana Menteri, sejak itu Kamboja memasuki masa pemerintahan Pol Pot yang merupakan sejarah hitam bagi Kamboja.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimana proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan di Kamboja? Pada permasalahan tersebut akan membahas mengenai situasi Kamboja dan pemerintahannya pada masa tersebut, sehingga Pol Pot dapat muncul sebagai orang yang berkuasa di Kamboja dan menjabat sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, di samping itu juga diuraikan sikap Pol Pot selanjutnya terhadap negara-negara pendukungnya
2. Bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan Pol Pot dalam menjalankan pemerintahan di Kamboja? Pada permasalahan tersebut akan membahas mengenai berbagai hal atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Pol Pot yang digunakan untuk menegakkan eksistensi pemerintahannya selain itu dibahas juga mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Pol Pot agar pemerintahannya tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya.
3. Bagaimana akhir pemerintahan Pol Pot di Kamboja? Pada permasalahan ini akan membahas tentang reaksi yang muncul terhadap pemerintahan Pol Pot di

Kamboja yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, termasuk juga hambatan-hambatan yang ditemui dalam menjalankan pemerintahan sampai munculnya Heng Samrin yang didukung oleh rakyat maupun oleh Vietnam untuk menggantikan Pol Pot yang dinilai sangat kejam dalam menjalankan pemerintahannya tersebut.

### C. Tujuan Penulisan

Penulisan yang dilakukan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan di Kamboja, yang menyangkut masalah situasi Kamboja dan situasi pemerintahannya pada masa tersebut, sehingga Pol Pot dapat menjadi presiden dan orang yang paling berkuasa di Kamboja.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha dan langkah-langkah yang diambil oleh Pol Pot dalam menjalankan pemerintahan di Kamboja, sehingga dapat digunakan untuk menegakkan eksistensi pemerintahannya agar pemerintahannya tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Pol Pot.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai akhir dari pemerintahan Pol Pot di Kamboja, yang berhubungan dengan banyaknya reaksi yang muncul dari dalam dan luar negeri, dan dukungan Vietnam terhadap Heng Samrin untuk menjatukan Pol Pot, sehingga pemerintahan

Pol Pot tersebut harus diakhiri dan digantikan oleh pemerintahan di bawah pimpinan Heng Samrin.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tahun 1975 – 1979”, diharapkan hasilnya akan memberikan manfaat.

1. Penulisan ini akan memberikan manfaat bagi pendidikan sejarah yaitu untuk memberikan sumbangan pengetahuan mengenai Kamboja, pada masa pemerintahan Pol Pot, tahun 1975 – 1979, sehingga dengan adanya penulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi calon guru maupun guru dalam menggambarkan kondisi atau keadaan Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tersebut.
2. Penulisan yang dilakukan ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah yaitu sebagai bahan dan pengetahuan yang melengkapi dan menambah wawasan mengenai pemerintahan Pol Pot di Kamboja.
3. Penulisan ini bermanfaat bagi generasi muda yaitu untuk menambah pengetahuan mereka mengenai sejarah dan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu kepada sejarah. Sehingga dengan penulisan ini diharapkan akan menambah sumber bacaan bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui tentang Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tahun 1975 – 1979.

### E. Tinjauan Pustaka

Penulisan yang berjudul “Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tahun 1975- 1979” ini merupakan suatu penulisan yang bersifat penelitian kepustakaan , di mana data-data yang diperoleh berasal dari buku-buku atau kepustakaan. sehingga untuk memperoleh data-data meupun fakta-fakta di dapatkan melalui penelitian dari beberapa buku atau bacaan lainnya. Agar permasalahan yang terdapat di dalam penulisan ini dapat dijawab dengan jelas dan lengkap, maka penulisan menggunakan beberapa sumber. Adapun sumber-sumber yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut dapat dibagi kedalam sumber primer dan sumber sekunder, yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh orang-orang atau lembaga sejaman, atau juga merupakan hasil rekaman yang sejaman dengan peristiwanya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan atau diperoleh dari orang atau lembaga tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan dengan kata lain merupakan sumber yang berasal dari tangan kedua<sup>2</sup>.

Dalam penulisan yang dilakukan ini digunakan berbagai sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder yang dipakai untuk mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan ini, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang bersifat kepustakaan karena penulisan ini studi pustaka.

Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka sumber yang banyak digunakan di dalam penulisan ini adalah sumber sekunder, dimana sumber yang

---

<sup>2</sup> Louis Gottschalk, *Megerti Sejarah* Jakarta, 1975, UI, hal. 34

digunakan merupakan data-data kepustakaan. Agar diperoleh suatu data yang lengkap mengenai suatu fakta di dalam permasalahan, maka perlu juga digunakan sumber lain sebagai sumber pembanding atau referensi tambahan, di samping adanya sumber pokok. Adapaun sumber pokok yang terdapat di dalam penulisan ini adalah *When The War Was Over, Cambodia's Revolution and the voices of Its People*, oleh Elizabeth Becker. Di dalamnya terdapat informasi-informasi yang penting dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penulisan ini, sehingga memberikan begitu banyak sumbangan kepada penulis mengenai informasi tersebut. Karena buku ini berisikan mengenai sejarah Kamboja pada abad ke-20.

Sumber lain yang digunakan sebagai sumber primer adalah surat-surat kabar maupun majalah yang terbit sejaman dengan peristiwa tersebut, seperti Merdeka 1979, Sinar Harapan 1979, Kompas 1980 dan masih banyak lagi. Di mana surat-surat kabar tersebut mengisahkan berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan, sehingga merupakan suatu sumber yang cukup penting, karena berisi mengenai awal mula pemerintahan Pol Pot sampai pada akhir pemerintahan.

Sumber lain yang juga cukup penting yaitu *The Rise and Demise Democratic in Campuchea*. Buku ini memberikan sumbangan terhadap penulis berupa data-data mengenai situasi politik Kamboja yang berlangsung pada abad ke-20.

Penulisan mengenai Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot ini juga menggunakan sumber yang berjudul *History of Cambodia*. Sumber ini banyak

memberikan sumbangan bagi penulis di dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas. Karena di dalamnya berisi mengenai Kamboja yang terus menerus mengalami pergantian kekuasaan, yang juga terdapat pemerintahan Pol Pot sampai pada akhir pemerintahan tersebut.

Selain sumber-sumber di atas, digunakan juga sumber-sumber lain yang relevan dan dapat memberikan data-data mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### F. Landasan Teori

Untuk dapat melakukan pembahasan pada permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu penjelasan mengenai beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang berhubungan dengan judul skripsi “Kamboja Pada Masa Pemerintahan Pol Pot”, teori yang perlu dipahami yaitu:

##### 1. Pemerintah → Bukan Teori / Tapi Definisi !!!

Menurut C.S.I. Kansil, pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, dan pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara yang terkenal adalah kerajaan (monarki), dan republik. Kerajaan atau monarki tersebut merupakan suatu negara dengan kepala seorang raja dan bersifat turun temurun serta jabatannya seumur hidup. Selain raja, kepala negara yang menganut sistem monarki dapat berupa kaisar. Sedangkan republik merupakan suatu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai

oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu<sup>3</sup>.

Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem pemerintahan adalah pola pengaturan hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya atau bila di sederhanakan adalah hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan ini meliputi baik hubungan hukum, hubungan organisasi, hubungan kekuasaan, maupun hubungan fungsi<sup>4</sup>.

Pemerintahan adalah suatu badan atau gabungan dari badan Negara yang tertinggi dan berkuasa penuh untuk memerintah suatu wilayah.

Aristoteles (384-322 SM) diakui oleh umum sebagai peletak dasar ajaran bentuk-bentuk pemerintahan mengemukakan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan atas dasar dua kriteria.

Berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan di dalam suatu Negara, pemerintah dapat dipegang oleh satu orang, lebih dari satu orang atau banyak orang. Perbedaan jumlah orang yang memerintah tersebut menimbulkan perbedaan bentuk pemerintahan.

Menurut Aristoteles, bentuk Negara monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikenal sebagai bentuk kenegaraan ajaran klasik-tradisional yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi kemerosotan.

- monarki

---

<sup>3</sup> C.ST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakart, Bumi Aksara, 1990, hal 21.

<sup>4</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung, Sinar Baru, hal, 140.

Kata monarki berasal dari Yunani, monos berarti satuan dan archeim yang artinya menguasai atau memerintah yang seluruh kekuasaannya dipegang oleh seorang penguasa yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum (rakyat).

- tirani (diktaktor)

Tirani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada satu orang, tetapi tetap berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan (kepentingan) dirinya sendiri serta tidak mengindahkan kesejahteraan rakyat (umum). Tirani adalah bentuk kemerosotan pemerintahan monarki.

- aristokrasi

Aristokrasi berarti kaum bangsawan atau cendekiawan dan kratein yang berarti kekuasaan aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya berpusat pada beberapa orang (golongan) yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum (rakyat). Bentuk seperti ini disebut aristokrasi karena penguasaannya adalah orang-orang yang dianggap paling baik atau cendekiawan dan senantiasa mewujudkan kesejahteraan umum atau rakyat.

- oligarki / plutokrasi

Oligarki artinya beberapa dan archeim artinya memerintah, sehingga oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang oleh beberapa orang yang pelaksanaannya lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Plutokrasi berasal dari kata plutos yaitu kekayaan,

cratein artinya pemerintahan, sehingga plutokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh oraang-orang kaya atau untuk mencari kekayaan.

- demokrasi / politiea

Demos artinya rakyat dan cratein artinya kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Menurut Plato, (429-347 SM), bentuk-bentuk pemerintahan dibagi menjadi lima, dan harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia, bentuk-bentuk tersebut yaitu:

- aristokrasi

Pemerintahan dipegang oleh kaum cendekiawan, yang dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan.

- Timokrasi

Pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemsyuran dan kehormatan.

- Oligarki

Pemerintahan dipegang oleh golongan hartawan.

- Demokrasi

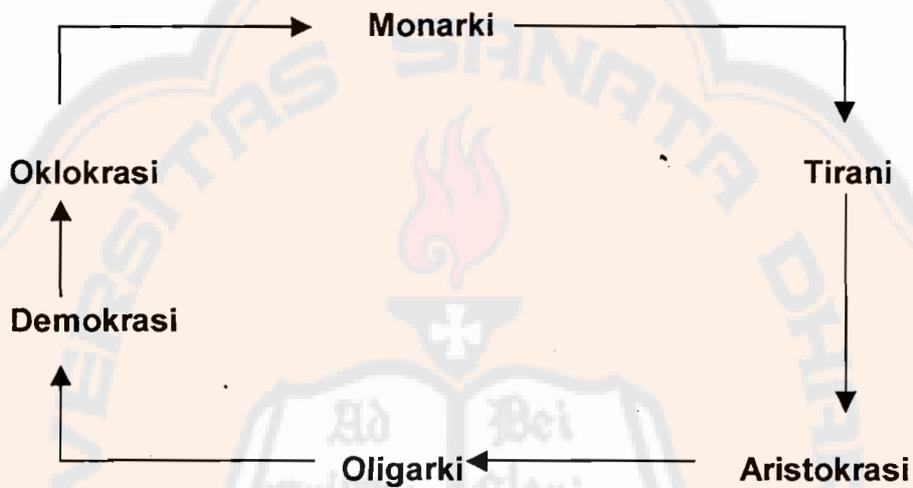
Pemerintahan oleh rakyat.

- Tirani

Pemerintahan dipegang oleh seorang tiran secara sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan.

Menurut Polybios yang dikenal dengan *Cyclus Theory* sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan lokal politeia dengan demokrasi.

Teori siklus polybios dapat digambarkan sebagai berikut:



Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa yaitu raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.

Situasi pemerintahan tirani dilaksanakan dengan sewenang-wenang, muncullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih pada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang dan

memperhatikan kepentingan umum, serta bersifat baik. Pemerintah pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi. Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum pada perkembangannya tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri.

Pemerintahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari unsur negara dan kekuasaan. Negara menurut Rogel H Soltau yaitu suatu alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama rakyat.<sup>5</sup> Sedangkan Harold J Laski berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.<sup>6</sup> Dan negara tersebut mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya yang terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Sifat-sifat negara tersebut yaitu:

1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 39.

<sup>6</sup> *Ibid*

2. Sifat Monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, maka negara menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat mencakup semua (*all-ecompassing, all-embracing*). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkendali.<sup>7</sup>

Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut dan angkasa di atasnya.
- b. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari penduduk yaitu kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.
- c. Pemerintah. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya.

---

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, *op.cit*, hal. 42.

d. Kedaulatan. Merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia<sup>8</sup>.

Dalam Marxisme-Leninisme, teori negara kuat ini menjelma dalam konsep negara sebagai *diktatur proletariat*. Di sini, negara juga memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warganya.

Alasan yang dipakai serupa dengan alasan Hegel, yakni misi kesejarahan, meski tidak sama. Hegel menyatakan bahwa negara mempunyai misi untuk membawa masyarakat manusia merealisasikan ide universal, yakni masyarakat yang merdeka. Dalam konsep diktatur proletariat, misi negara juga sama, yakni merealisasikan sebuah masyarakat yang dianggap sebagai ujung terakhir dari proses sejarah, yaitu masyarakat egalitarian, yang juga dikenal sebagai masyarakat komunis.<sup>9</sup>

Negara merupakan organisasi yang paling tinggi dan mencakup pengertian yang paling luas. Larson, seperti yang dikutip oleh Lawson, mengatakan bahwa negara adalah “sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya”, sementara pemerintah “cuma sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik”. Sementara Calvert menyatakan negara adalah “komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik;

---

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia 1982, hal 39-44.

<sup>9</sup> Arief Budiman, *Teori Negara*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 21.

pemerintah adalah individu-individu yang mengambil keputusan yang memberi dampak bagi warga negara sebuah masyarakat.” Greenberg sendiri menyebut negara sebagai “pengaturan kekayaan” atau “property rules.” Negara mengatur bagaimana kekayaan diproduksi dan bagaimana kemudian dia dibagikan menurut aturan yang dibuat. Dalam sebuah negara kapitalis, aturan kekayaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme. Dalam negara feodal, aturannya didasarkan pada prinsip-prinsip feodal.<sup>10</sup>

Menurut Locke yang dikutip dari Franz Magnis Suseno, kekuasaan negara liberal adalah penguasa menerima kekuasaannya dari masyarakat demi suatu tujuan tertentu yaitu, untuk melindungi kehidupan dan milik para warga masyarakat, maka penggunaan kekuasaan itu hanya sah dalam rangka tujuan itu dan harus dipertanggung jawabkan. Jadi negara tidak berhak untuk mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencampuri segala bidang kehidupan masyarakat. Negara tidak mempunyai legitimasi untuk mengurus segala-galanya. Inti paham liberal tentang negara adalah bahwa kekuasaan negara harus seminimal mungkin.<sup>11</sup>

Pada dasarnya teori-teori negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Teori yang menekankan bahwa negara merupakan sebuah lembaga yang mandiri, yang mempunyai kepentingan dan kemauan sendiri. Teori ini

---

<sup>10</sup> Arief Budiman, *op.cit*, hal. 84-85.

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 229.

dicetuskan oleh Hegel kemudian diartikulasi lagi menjadi teori Negara Organik sekarang ini.

2. Teori negara yang mengatakan bahwa negara bukan sebuah lembaga yang mandiri. Kebijakan yang dihasilkan negara ditentukan oleh faktor eksternal atau faktor diluar dirinya. Dia hanya sekedar arena di mana kekuatan-kekuatan sosial berusaha saling bertanding untuk menguasai. Dia adalah semacam tabula rasa, sebagai kertas putih yang siap ditulisi oleh orang lain. Orang lainlah yang akan menulis di atas kertas tersebut bukan kertas itu sendiri.

Teori ini punya dua varian:

Pertama: varian kaum Pluralis, yang beranggapan bahwa negara hanya melaksanakan kepentingan yang beranekaragam yang ada di masyarakat. Kebijakan negara adalah hasil sebuah kompromi dari kekuatan-kekuatan tersebut. Tidak ada yang mendominasi. Walaupun ada satu kelompok yang kuat dan berhasil menguasai negara, ini merupakan hasil persaingan yang demokratis dan sifatnya sementara. Karena pada dasarnya, kebijakan negara ditentukan oleh pertemuan berbagai kepentingan di dalam masyarakat.

Kedua: varian kaum Marxis, mengatakan bahwa negara dikendalikan oleh kelompok yang paling dominan di masyarakat. Kelompok atau kelas yang paling dominan ini secara terus menerus akan

menduduki posisi dominan tersebut, karena memang sistem ekonomi-politik di masyarakat tersebut memungkinkan hal ini.<sup>12</sup>

Kita lihat teori-teori ini dengan memakai pemilahan menurut keempat unsur atau aspek negara:

1. Teori negara mandiri menekankan pentingnya elite atau personel negara yang menguasai lembaga ini. Elite negara ini merupakan aspek pemerintah atau aparat birokrasi dalam model yang dikemukakan Greenberg. Dengan demikian teori negara mandiri sangat menekankan peran pemerintah dan aparat birokrasi dalam menentukan tingkah laku negara. Kalau negara mau diubah, unsur-unsur inilah yang harus dikuasai.
2. Teori negara yang mengatakan bahwa negara tidak mandiri. Varian teori pluralis dari teori ini memekankan pada proses yang ada di masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan negara. Sedangkan varian Marxis menekankan pada sistem ekonomi-politik (pengaturan sistem kekayaan dan pakta dominasi yang terjadi) yang melahirkan kelompok atau klas dominan dalam masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Teori kaum pluralis menekankan bahwa kekuatan masyarakat harus dimobilisasi supaya kebijakan negara dikeluarkan dan dilaksanakan oleh negara seperti yang dikehendaki. Teori ini dengan demikian sangat memberi tekanan pada “output” proses politik dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Arif Budiman, *op.cit*, hal 98.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 98-101.



kebijakan publik. Peran kondisi struktural ataupun peran kepentingan dari personal yang menguasai pemerintah serta aparat birokrasinya tidak diperhatikan.

Negara dalam teori Marxis adalah alat dari kelompok yang dominan di dalam masyarakat. Kelompok yang dominan tercipta karena sistem atau organisasi ekonomi yang ada memproduksi kelompok atau kelas ini. Dengan kata lain, tingkah laku negara merupakan manifestasi dari sistem penguasaan ekonomi-politik atau *mode of production* yang ada.<sup>14</sup>

Sedangkan kekuasaan, adalah kemampuan seorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkahlakunya seorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Oleh Robert M. Iver dikemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul dari pada lainnya. Hal ini membuktikan bahwa yang satu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainnya itu. Atau struktur piramida kekuasaan itu terbentuk oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkuasa dan yang memerintah itu relatif lebih kecil jumlahnya dari pada golongan yang dikuasai

---

<sup>14</sup> Arif Budiman, *op.cit*, hal.101.

dan pemerintah. Dan kenyataan tersebut berlaku baik dalam sistem demokrasi maupun diktator.<sup>15</sup>

Sumber kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekerasan fisik dan juga dapat bersumber pada kedudukan, kekayaan dan kepercayaan<sup>16</sup>.

Dua pemikir besar Yunani kuno, Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi liar, tak dapat dikendalikan, bila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Negara harus menjinakkan mereka dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional. Seperti dikatakan Plato yang terdapat dalam bukunya Schmid:

Dalam negara tersebut akan berkuasa akal (rasio) sebagai ganti Tuhan. Segala keinginan untuk mementingkan diri sendiri harus dihilangkan dahulu bilamana kehidupan negara yang sungguh-sungguh sempurna akan dicapai. Individu harus samasekali tunduk pada keseluruhan (kolektiviet).<sup>17</sup>

Hegel menyatakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari ide-ide yang unuversal. Sedangkan idividu merupakan penjelmaan dari yang partikular, dalam bentuk kepentingan yang sempit. Negara memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yakni merelisasikan ide besar yang menjadi tujuan dari gerak sejarah umat manusia. Negaralah yang akan menjadi agen sejarah untuk membantu manusia yang sekarang berproses menjadi manusia yang bisa menciptakan masyarakat yang sempurna di kemudian hari.

---

<sup>15</sup> Miriam Budiarjo, *op.cit*, hal. 35-36.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 35-36

<sup>17</sup> Arief Budiman, *op.cit*, hal. 8.

Keinginan negara merupakan keinginan umum untuk kebaikan semua orang. Karena itulah negara harus dipatuhi.<sup>18</sup>

Karena itulah Hegel berpendapat bahwa negara modern memiliki hak untuk memaksakan keinginannya kepada warganya. Karena negara mewakili keinginan umum, negara merupakan manifestasi dari sesuatu yang ideal dan universal. Dengan mematuhi negara, individu yang menjadi warga negara tersebut sedang dibebaskan dari kepicikannya yang hanya memperjuangkan kepentingan dirinya yang sempit. Negara adalah penjelmaan dari kemerdekaan rasional, yang menyatakan dirinya dalam bentuk yang objektif.<sup>19</sup>

Menurut Cardoso kita harus membedakan antara apa yang disebut rejim dan negara. Rejim adalah "aturan-aturan formal yang menghubungkan lembaga-lembaga politik utama (legislatif, ke eksekutif, eksekutif ke yudikatif, dan hubungan partai-partai ke lembaga-lembaga ini semua), disamping juga persoalan bentuk hubungan politik antar warga dan pemerintahannya (demokratis, oligarkis, totaliter, atau apa saja). Rejim adalah sistem politik yang dijalankan. Sedangkan menurut D. Krasner, rejim lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip, norma-norma aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.16.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Arief Budiman, *op.cit*, hal 43 dan 87.

Negara menurut Cardoso, yaitu "aliansi dasar, 'pakta dominasi' utama dari fraksi-fraksi kelas yang dominan, serta aturan-aturan yang menjamin kekuasaan mereka terhadap kelas-kelas yang ada di bawahnya."<sup>21</sup>

Maka penguasa yang berada di atas kepemimpinan suatu negara dan cenderung tidak mau dikritik dan ditentang. Hasilnya adalah sebuah rejim yang sifatnya otoriter dan lebih mengarah pada bentuk negara yang totaliter.

## 2. Ideologi ~ Definisi !!!

Ideologi merupakan sekumpulan cita-cita dan tujuan yang membantu anggota-anggota dari sistem yang bertujuan untuk menginterpretasikan masa lalu, menjelaskan masa sekarang dan menawarkan sebuah visi untuk masa depan. Dengan demikian mereka menggambarkan tujuan untuk beberapa anggota yang menggunakan kekuatan politik di mana kekuatan itu digunakan dengan sebaiknya dan dibatasi. Oleh sebab itu ideologi mungkin menjadi seperti mitos tentang kehidupan politik yang dijalankan oleh pelaku politik oleh sebab itu dijadikan sebagai penilaian yang bersifat realistik dan digunakan sebagai suatu aspirasi.

Tetapi juga ideologi memiliki potensi karena ideologi merupakan sebuah kumpulan etika yang memasukkan cita-cita, dan sebuah manipulasi atau alat dari pandangan yang mungkin diinterpretasikan sebagai kategori dari sebuah gagasan agar menghimpun kekuatan masyarakat. Dari pernyataan pandangan tersebut bahwa cita-cita yang dapat membangun dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

menginspirasi gagasan-gagasan tersebut agar tercapainya suatu tujuan. Nilai yang bermacam-macam terdiri dari pendapat, interpretasi dari etika dan sekumpulan prinsip yang mempunyai tujuan tertentu, organisasi, dan batas-batas kehidupan politik.<sup>22</sup>

Ideologi tumbuh dalam kondisi krisis dan dalam bagian masyarakat yang terus berlangsung sampai sekarang. Sehingga ideologi terlihat sebagai sebuah jalan tetapi hal tersebut dapat merubah bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat. Ahli politik V.O. Key, Jr, mengamati ideologi dalam pengertian ini adalah penjelasan sistematis dari spesifik isu-isu yang menjadi suatu kepercayaan dimana hal tersebut dibatasi dan menjadi bagian yang mempengaruhi kehidupan di dalam masyarakat yang berdampak cukup besar dalam kehidupan tersebut. Bagaimanapun juga ideologi secara eksplisit dipropagandakan oleh pengaruh dan kritikan kaum minoritas.<sup>23</sup>

### 3. Komunisme

Ideologi yang digunakan oleh negara Kamboja adalah komunis, maka akan dibahas mengenai komunis itu sendiri. Komunisme menurut Miriam Budiarjo yaitu, dimengerti sebagai sistem sosial-politik, ideologi dan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai Marxisme.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> , *Idelogis and Modern Plitical*,

<sup>23</sup> Alfred. A, Knop,. *Public Opinion and American Democracy*, New York, 1961, hal 49.

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo, *op.cit*, hal. 87.

Di dalam komunisme kita akan menemukan dua nama yang berpengaruh yaitu Lenin dan Marx, karena telah kita ketahui juga bahwa Lenin itu sendiri merupakan pengikut Marx.

Komunisme itu merupakan suatu gerakan marxis malahan satu-satunya marxis yang bersifat murni. Menurut materialisme sejarah bentuk-bentuk masyarakat disebabkan alat-alat produksi yang terdapat pada suatu masa. Contoh sebelum terdapat mesin-mesin, maka masyarakat industri yang kita kenal sekarang tidak mungkin ada, tetapi sesudah ada mesin-mesin timbulnya “masyarakat industri” tidak terhalang lagi.<sup>25</sup>

Di dalam masyarakat timbul perbedaan-perbedaan kelas. Perkataan “kelas” ini adalah perkataan yang penting sekali dalam marxisme. Di dalam suatu masyarakat tiap-tiap manusia tergantung hidupnya dari alat-alat produksi. Maka terdapatlah sekarang “masyarakat kelas” artinya suatu masyarakat dimana alat-alat produksi berada dalam milik dan kekuasaan dari suatu golongan manusia yang kecil jumlahnya. Pertentangan kelas inilah, menurut Marx yang menyebabkan segala kesengsaraan dan segala perjuangan dalam sejarah.<sup>26</sup>

Jika Marx membicarakan proletariat yang revolusioner, atau golongan rakyat biasa yang dikenal sebagai kaum buruh pabrik yang menginginkan suatu perubahan bagi golongan sosialnya, sehingga tidak lagi dijadikan sebagai

---

<sup>25</sup> J. Hulsebos, *Komunisme, Pengaduan, Djandji, atau Antjaman?*, Jakarta, Pembangunan Jakarta, 1955, hal. 26.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 12.

warga negara yang berasal dari golongan rendah. Di dalam golongan itulah kemudian menumbuhkan pendapat-pendapat yang dijadikan inspirasi bagi kaum Marxis Rusia. Mereka menganggap bahwa juga di Rusia harus lebih dulu ada perkembangan industri dan pembentukan proletariat industri dalam hal ini adalah buruh pabrik sebelum timbul suatu revolusi di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Pada satu pihak Marxisme memandang sejarah sebagai suatu proses yang ditentukan oleh perkembangan alat-alat produksi dan perhubungan-perhubungan masyarakat yang termasuk dalam soal itu. Di dalam proses ini sesuatu keadaan yang terdahulu mengakibatkan keadaan yang berikutnya. Dan juga sebaliknya, keadaan yang kemudian hanya bisa terjadi karena dalam periode sebelumnya terlaksana hal-hal yang memungkinkannya. teori-teori inilah yang mengendalikan orang-orang Marxis Rusia pada permulaannya.<sup>28</sup>

Marxisme adalah suatu ajaran pembebasan, di mana diajarkan bahwa manusia dapat menentukan perjalanan sejarah dan menghentikan segala penindasan dan segala pertentangan kelas. Inilah panggilan istimewa kepada kaum proletariat, yang akan membentuk masyarakat komunis, di mana tidak akan ada lagi penindasan dan ketidakadilan. Khususnya sebagai ajaran

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>28</sup> *Ibid*

pembebasan, Marxisme merupakan daya penarik yang kuat bagi beribu-ribu manusia.<sup>29</sup>

Di dalam Marxisme Rusia, pada akhirnya terdapat suatu perpecahan yaitu adanya sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan berpikir terus dalam garis marxis pertama, seperti Plechanow. Sayap kanan ini kemudian bernama Mensjewiki. Mereka menumpahkan perhatiannya kearah mengorganisir kaum buruh dalam serikat-serikat sekerja, terdapat juga suatu paham kritis terhadap marxisme yang seolah-olah menggambarkan revisionisme di Eropa Timur. Pada sayap kiri seluruh titik berat terletak dalam aksi revolusioner. Marxisme merupakan kepercayaan yang mutlak atas panggilan revolusi dan penghidupan komunis dikemudian hari. Sayap kiri ini kemudian bernama Bolsjewis. Pemimpin besar dari Marxisme Bolsjewis ini adalah Lenin.<sup>30</sup>

Marxisme dipahami sebagai ajaran atau doktrin yang bersumber pada gagasan-gagasan Karl Marx pada dasarnya menitikberatkan pada empat ide yaitu:

1. Sistem Kapitalisme yang mengakibatkan sekelumit kecil orang-orang kaya hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja atau buruh yang teramat banyak jumlahnya hidup dalam kesengsaraan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 77-78.

2. Cara untuk merombak ketidakadilan adalah dengan melaksanakan suatu sistem sosialis, yaitu sistem di mana alat-alat produksi dikuasai oleh negara bukan pribadi swasta.
3. Pada hematnya, satu-satunya jalan paling baik untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan.
4. Untuk mewujudkan suatu sistem sosialis harus dibentuk ketidakadilan Partai Komunis dalam jangka waktu memadai.<sup>31</sup>

Paham komunis dengan begitu tidak dapat terlepas dari ajaran marxisme, di mana masyarakat yang diinginkan dari pandangan tersebut adalah terciptanya masyarakat yang tanpa kelas, sehingga tidak ada perbedaan sosial dalam masyarakat yang memicu adanya konflik-konflik sosial, maka faktor-faktor produksi yang ada di dalam suatu negara dikuasai sepenuhnya oleh negara.

Cina merupakan suatu negara yang mengikuti paham komunis, tetapi paham komunis tersebut telah dimodifikasi oleh Mao Zedong. Apabila negara-negara Eropa yang mengikuti paham komunis gerakannya diorientasikan pada kaum buruh pabrik, tetapi di Cina gerakannya lebih ditekankan pada kaum petani. Hal ini disebabkan karena kondisi Cina pada waktu itu masyarakatnya sebagian besar adalah petani, sementara industri Cina kurang berkembang.

---

<sup>31</sup> Michael Hart, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1985, hal. 88.

Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot merupakan sebuah negara yang mendapat pengaruh komunis dari Cina, terutama pengaruh dari Mao Zedong, maka Kamboja menggunakan ideologi pemerintahan yang dipengaruhi komunis Cina yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran Mao Zedong.

Menurut Mao Zedong, orang-orang Cina tidak dapat hidup hanya dengan nasi, tetapi memerlukan suatu tindakan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka untuk keperluan tersebut pemerintahpun menyediakan para penjahat untuk dibunuh oleh rakyat, dengan kata lain rakyat memerlukan masa terror. Perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hukuman mati yang dilaksanakan harus merupakan suatu impian mengenai gerakan yang bertujuan hari depan yang lebih baik. Tindakan-tindakannya yang didasarkan asumsi bahwa jalan masyarakat manusia untuk menuju kebahagiaan dan kemajuan itu haruslah melalui kegoncangan dan revolusi. Karena tidak ada revolusi tanpa kegoncangan yang kejam. Maka setiap desa memerlukan masa teror, sekurang-kurangnya beberapa orang jagoan dan penindas harus ditembak di setiap wilayah. Hanya inilah cara menindas perlawanan (reaksi). Setiap daerah memerlukan satu kesatuan untuk memberantas revolusi-tantangan (kontra-revolusi).<sup>32</sup>

Mao Zedong juga berpendapat bahwa akibat dari kegagalan politiknya yang bertajuk Lompatan Jauh Ke Depan atau Melangkah Maju Besar adalah

---

<sup>32</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979

jumlah penduduk yang besar di mana hal tersebut menimbulkan masalah tambahan yang menghalangi kemajuan ekonomi. Karena itu ia mengajukan suatu rencana untuk mengurangi jumlah penduduk. Mao berkata, "Saya setuju merayakan sebagai hari gembira kematian seseorang diatas 50 tahun." "Kematian seseorang adalah hal yang biasa. Akhirnya kemanusiaan sebagai satu kesatuan telah disumpah untuk musnah." "Kematian mempunyai segi positif atau menguntungkan, seseorang itu dapat dijadikan sebagai rabuk ." "Apabila ada orang yang mati perlu diadakan suatu pertemuan untuk merayakan kemenangan dialektika."<sup>33</sup>

Pendapat Mao yang lainnya yaitu mengenai uang, uang merupakan sumber kejahatan. Oleh sebab itu janganlah membenarkan uang kertas berkuasa. Dan menegaskan bahwa tenaga buruh sukarela, tanpa batas dan upah yang terdapat di Tiongkok untuk kepentingan sosialisme dan komunisme bukan untuk kepentingan upah yang lebih tinggi. Dengan memperkenalkan penyediaan makanan umum di masa Lompatan Jauh Kedepan. Mao mencoba menghapuskan keluarga dengan bantuan "komune" sebagai satu kesatuan ekonomi masyarakat. Ia menuntut agar komune harus menerima anak-anak bersekolah, begitu mereka dapat dipisahkan dari ibunya dengan aman. Ia kembali lagi mencoba melenyapkan keluarga pada masa Revolusi Kebudayaan, sesuai perintahnya, Pengawal Merah mencoba

---

<sup>33</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979

melaksanakan semboyannya: “Biarlah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemesraan kemanusiaan dilenyapkan.”<sup>34</sup>

Mao Zedong berpendapat bahwa kota adalah tempat di mana para penjajah atau pemberontak negara yang akan mengakibatkan kekacauan bagi pemerintahan. Hanya desa yang tidak berbatas, padang luas bagi kegiatan-kegiatan revolusioner. Kota dan kota sajalah menjadi pangkalan revolusi, dari mana kaum revolusioner berbaris menuju kepada kemenangan. Menurutnya hanya desa sajalah sekolah politik dan ideologi yang dapat dengan benar mendidik setiap anggota partai. Hanyalah kaum tani, kaum komunis dapat disesuaikan dengan cara-cara klas dan memperbaiki kesadaran klas sendiri. Pada suatu sidang Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Mao berkata, “Kita berjalan dari kota-kota ke desa-desa untuk bergabung dengan petani setengah proletar; kami mengatur satu partai dan satu tentara; kami makan dari tempat makan yang sama; kami tidak menerima upah; kami mempunyai sistem persediaan komunis. Begitu kami memasuki kota, kami perlahan-lahan turun derajat. Aturan-aturan lama sudah bertentangan dengan kami. Kami ingin berpakaian bulu domba; kami mulai mencukur diri; kader partai menjadi intelektual; upah uang menggantikan sistem pembagian bebas; pakaian dengan tiga warna lenyap, bersamaan dengan satu tata penyediaan makanan berbintang lima...”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

Mao Zedong yakin sekali bahwa setiap orang ingin hidup di kota-kota besar untuk kesenangan dari pada untuk bekerja. Diajarkannya: “Semua pelaku, ahli sajak, penulis sandiwara, penulis-penulis haruslah dikeluarkan dari kota-kota dan dikirimkan ke desa-desa.” Kirimkanlah rombongan demi rombongan ke desa-desa.<sup>36</sup>

Mao Zedong sejak kecil merupakan seorang yang atheis, sehingga tumbuh menjadi kebencian terhadap agama. Pada masa Revolusi Kebudayaan, Mao memerintahkan Pengawal Merah untuk mencemarkan tempat-tempat suci. Untuk meyakinkan penduduk Tiongkok bahwa mereka hidup bahagia pengikut-pengikut Mao membandingkan tingkat hidup mereka (sekarang) dengan masa pemerintahan Kuo Min Tang. Tujuannya menceritakan masa pahit kemarin dan yang menggembirakan hari ini, agar rakyat dapat menerima pemerintahan yang tengah berlangsung sekarang.<sup>37</sup>

Mulanya Mao berpegang pendapat, kaum buruh industri di kota-kota merupakan basis terkuat penyokong Partai Komunis, ini sejalan dengan teori Marx. Tapi sekitar tahun 1952 Mao berkesimpulan paling sedikit di Cina. Soko guru partai berasal dari kaum tani, bukan buruh. Anggapan ini ada dasarnya, karena selama pertempuran dengan rejim Nasionalis Mao selalu berada di daerah pedesaan. Gagasan ini diterapkan tatkala dia menjadi Kepala Negara. Sewaktu Stalin berkuasa di Rusia umumnya pembangunan menitik

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

beratkan pada sektor produksi industri, Mao umumnya menarik perhatian lebih besar pada pembangunan sektor pertanian dan pedesaan. Meski begitu, pembangunan industri Cina di bawah Mao dapat maju dengan pesatnya.<sup>38</sup>

Penentuan peran militer sebagai kekuatan yang dinamis dari perkembangan revolusi telah dikemukakan secara jelas oleh Lenin dan Stalin. Ketertarikan Lenin dengan model militer sedikit banyak telah mempengaruhi Mao. Seperti pada dasar negara sebagai kepentingan umum dari militer dalam aktivitas revolusioner dan hal-hal yang penting tentang sikap-sikap politik dari perjuangan militer yang ditegaskan seterusnya oleh Lenin. Sumbangan Mao di sini dalam pengembangan konsep dari “perang rakyat” yang berlarut-larut dan strategi dari perang gerilya petani.

Kekuatan politik, Mao mengemukakan bahwa partai berhak atas senjata, dan senjata tidak akan pernah dan tidak diperbolehkan untuk memimpin partai. Dia menegaskan, dalam kata lain, diatas kesatuan militer dan politik dan subordinasi dari yang lebih dulu untuk yang terakhir. Aktivitas militer bukan untuk tujuan pengganti dan bukan menduduki lebih dulu maupun bentuk lain dari aktivitas atau kegiatan selanjutnya, mesti dinilai oleh kriteria politik dan operasi militer dan merupakan suatu bentuk politik yang nyata.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Michael H. Hart, *op.cit*, hal. 132-132.

<sup>39</sup>

Mao menghendaki adanya perubahan yang mendasar di seluruh Cina yang bersifat agraris, maka ia membuat Laporan tentang Penyelidikan atas Gerakan Petani yang berkemanusiaan tahun 1927, Ia mengungkapkan dua hal, pertama, mengenai teori komunisnya yang menyimpang dari kebiasaan, dimana ia memberi tekanan pada kemampuan revolusioner petani bukannya kaum buruh kota. Kedua, justru mengenai implikasi-implikasi radikal yang ditimbulkan oleh seruannya untuk mengadakan revolusi di wilayah pedesaan.<sup>40</sup>

Di Cina tokoh yang berpengaruh dalam komunisme tersebut yaitu Mao Zedong, bahkan ia merupakan pendiri negara komunis Cina. Mao Zedong menafsirkan prinsip-prinsip marxisme yang sesuai dengan kondisi obyektif dan situasi konkret negara Cina pada waktu itu. Di mana Cina merupakan suatu negara agraris dengan sektor industri yang kurang berkembang.<sup>41</sup>

Doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh Mao Zedong yaitu;

- a. Peranan desa lebih penting dari pada kota
- b. Tentara merah lebih penting dari aksi massa
- c. Semangat revolusi lebih penting daripada keahlian teknis
- d. Kekuatan subyektif lebih penting daripada kenyataan obyektif

Revolusi di Cina dengan begitu harus berdasarkan pada kekuatan dan dukungan kaum tani, dan titik berat revolusi difokuskan atau dimulai dari

---

<sup>40</sup> William Ebenstein and Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta, Erlangga, 1987, hal. 86.

<sup>41</sup> Arifin Bey, *Dari Sun Yat Sen ke Mao Tse Tung*, Jakarta, Tinta Mas, 1953, hal. 18.

desa-desa bukan dari kota-kota. Hal tersebut karena jumlah kaum tani cukup besar, mereka mengalami langsung penderitaan akibat sistem oligarki tuan tanah dan sistem politik di Cina pada waktu itu. Dan hanya kaum tanilah yang sanggup menyediakan bahan makanan dan bahan mentah lainnya untuk keperluan revolusi, selain itu dapat digunakan sebagai anggota kaum revolusiner.<sup>42</sup>

Dari landasan teori tersebut dapat di simpulkan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh Pol Pot di Kamboja bersifat diktator. Di mana setiap kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan penguasa saja dalam hal ini Pol Pot sendiri. Rakyat tidak diberi kewenangan untuk menyalurkan aspirasinya dan setiap orang yang melawan atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut, maka segera diambil tindakan untuk melenyapkannya karena dianggap sebagai penghalang.

Ideologi yang dipakai Pol Pot dalam praktek pemerintahannya yaitu komunis, tetapi paham komunis yang dipakainya bukan komunis yang dikembangkan oleh Marx dengan ajarannya Marxisme, tetapi menggunakan paham komunis yang berasal dari Cina. Paham komunis Cina tersebut telah dimodifikasi oleh seorang tokoh pendiri Partai Komunis Cina yaitu Mao Zedong. Mao Zedong memodifikasi paham tersebut karena disesuaikan dengan kondisi Cina, baik dari segi masyarakatnya maupun geografinya.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Komunis Cina lebih menitikberatkan gerakannya pada kaum petani sedangkan pada paham komunis yang berkembang di Eropa gerakannya berorientasi pada kaum buruh pabrik. Perbedaan tersebut disebabkan karena masyarakat Cina sebagian besar merupakan petani, sehingga revolusi dititikberatkan pada petani. Selainnya itu masyarakat petani dapat dijadikan sebagai basis perjuangan revolusi komunis karena beberapa alasan, yaitu berdasarkan pada kekuatan dan dukungan kaum tani, dan titik berat revolusi difokuskan atau dimulai dari desa-desa bukan dari kota-kota. Hal tersebut karena jumlah kaum tani cukup besar, dan hanya kaum tanilah yang sanggup menyediakan bahan makanan dan bahan mentah lainnya untuk keperluan revolusi, selain itu dapat digunakan sebagai anggota kaum revolusiner.

Melihat paham komunis yang berkembang di Cina di bawah pengaruh dari Mao Zedong, maka Pol Pot pun menjadi terobsesi untuk menjadikan negara Kamboja yang berdasarkan ajaran-ajaran Mao. Pol Pot memilih komunis Cina yang dikembangkan oleh Mao karena dikarenakan beberapa hal, yaitu pertama, Pol Pot melihat bahwa terdapat kesamaan dalam segi penduduknya, penduduk Kamboja sebagian besar juga merupakan petani. Sama halnya dengan Cina, sehingga pemerintah berharap bahwa kaum petani dapat dijadikan sebagai basis gerakan revolusinya. Untuk itu pemerintah berusaha mengubah penduduknya menjadi petani dengan menggiring penduduk yang ada di kota-kota besar menuju ke pedalaman. Kedua, terdapatnya kesamaan faktor geografinya, yaitu sama-sama memiliki faktor-

faktor alam atau menitikberatkan pada sektor pertanian. Cina maupun Kamboja memiliki potensi pertanian yang cukup baik untuk dikembangkan. Di mana sektor industri yang terdapat di kedua negara tersebut kurang dapat berkembang pada saat itu, hal tersebut dikarenakan kurang terdapatnya tenaga ahli dalam hal perindustrian karena kebanyakan masyarakatnya adalah petani. Dan yang terakhir, yaitu karena Pol Pot merupakan pengikut ajaran Mao, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan politiknya berdasarkan pada ajaran-ajaran Mao.

Pol Pot lebih memilih menggunakan komunis Cina dibandingkan dengan komunis Rusia karena komunis Cina dirasa lebih cocok dengan keadaan Kamboja pada waktu itu, dimana komunis Cina menitikberatkan revolusinya pada kaum tani, karena kondisi masyarakat yang sebagian besar adalah petani. Demikian juga halnya dengan Kamboja, karena masyarakatnya sebagian besar juga masyarakat agraris.

## **G. Metodologi Penulisan**

Di dalam melakukan penelitian dan penulisan mengenai Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tahun 1975 – 1979, merupakan sebuah penulisan sejarah, oleh sebab itu harus menggunakan metode sejarah untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis maupun mengkaji berbagai fakta yang terdapat di dalam berbagai sumber. Dimana metode sejarah tersebut merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan

masa lampau secara imajinatif dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi<sup>43</sup>. metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sejarah yang sifatnya deskripsi analitis dimana penulisannya bersifat menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan lengkap berbagai peristiwa sejarah yang berdasarkan kausalitas, faktor-faktor kondisional, determinasi, ruang dan waktu. Selain menguraikan dan menggambarkan juga menganalisa fakta-fakta yang ada dengan menghubungkannya dengan peristiwa lain, sehingga di peroleh hasil yang jelas dan lengkap.

#### H. Metode Dan Pendekatan

Dalam menggunakan metode penelitian sejarah, terdapat empat tahap atau langkah-langkah di dalam penelitian yang dilakukan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

##### 1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti<sup>44</sup>. Sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang terdapat di dalam perpustakaan Sanata Dharma dan di berbagai tempat yang lain, yang berupa buku-buku pustaka, majalah dan surat kabar baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan oleh penulis yaitu surat kabar terbitan sejaman dengan peristiwa yang sedang

---

<sup>43</sup> *ibid* hal, 32.

<sup>44</sup> *ibid* hal 33

berlangsung, dimana surat kabar itu diterbitkan oleh CSIS. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu *When The War Was Over, The Rise and Demise Democratic in Kampuchea* dan masih banyak lagi.

## 2. Kritik Sumber

Kritik sumber atau disebut dengan verifikasi data merupakan suatu tahap untuk melihat dan menguji tingkat keaslian dari sumber-sumber yang digunakan di dalam penulisan dan penelitian sejarah yang dilakukan. Kritik sumber tersebut dilakukan agar dapat diketahui tingkat otentisitas atau keaslian sumber dan tingkat kredibilitas atau kebiasaan dipercaya dari sumber yang digunakan<sup>45</sup>. Kritik sumber didalam melakukan penelitian sejarah merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan karena digunakan juga sebagai penguji data penelitian yang dilakukan tersebut, guna menghindari adanya ketidakeaslian atau kepalsuan dan subjektivitas yang tinggi di dalam suatu sumber. Pada penelitian sejarah terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Di mana kritik ekstern merupakan kritik yang digunakan untuk mengetahui keaslian dari sumber yang digunakan, kritik ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai dan jenis huruf yang digunakan. Sedangkan kritik intern atau melakukan penilaian apakah sumber yang dipakai tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan kata lain bahwa sumber yang

---

<sup>45</sup> Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995 hal 99-100

digunakan harus mempunyai unsur kredibilitas atau sumber tersebut harus dapat dipercaya.

Dan hasil dari dilakukannya kritik sumber tersebut adalah fakta-fakta yang digunakan untuk merekonstruksi masa lampau. Kritik sumber yang dilakukan dalam penulisan ini adalah kritik intern. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak, penulis di dalam melakukan penulisan skripsi ini melakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang digunakan, yaitu surat kabar yang merupakan sumber primer, yang terdiri dari Koran Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, dan New York Time. Penulis melakukan kritik sumber dengan cara melihat dan mengkaji apakah sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan bersifat objektif, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipercaya dan relevan. Hasil dari kritik sumber adalah fakta-fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi sejarah. Penulis tidak melakukan kritik ekstern karena sifat bahan dari sumber yang digunakan merupakan hasil cetakan dari fotokopi yang diterbitkan.

Bukti bahwa penulis sudah melakukan kritik sumber khususnya kritik intern yaitu, pada sumber surat kabar, bahwa data-data yang ada di dalamnya di tulis sejaman dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Hanya saja kata-kata yang digunakan oleh penulis surat kabar tersebut merupakan bahasa Koran yang terlalu di besar-besarkan yang bertujuan agar para pembaca berminat untuk membacanya, sehingga penulis melakukan edit ulang terhadap

bahasa yang digunakan agar bahasanya dapat mudah dimengerti. Selain itu penulis juga membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya yaitu antara surat kabar dengan buku-buku yang digunakan, ternyata antara buku dan surat kabar terdapat kesamaan-kesamaan dalam hal data-data dan informasi yang terkandung di dalamnya, sebagai contoh kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Pol Pot, jumlah korban pada masa pemerintahan Pol Pot maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu.

### 3. Interpretasi

Interpretasi dilakukan setelah data-data maupun fakta yang terkumpul telah dan diuji kebenarannya, maka dilakukan tahap berikutnya yaitu menganalisa data yang ada dengan menguraikan informasi, fakta dan hubungan sebab akibat tanpa meninggalkan ketentuan-ketentuan dalam penulisan sejarah yang dilakukan. Yang paling penting dalam tahap ini yaitu mengurangi adanya unsur subyektivitas yang masih terdapat di dalam penulisan yang tengah dilakukan. Walaupun sebenarnya unsur subyektivitas akan tetap melekat pada setiap penulisan sejarah, karena penulisan sejarah tentu subyektifitas akan selalu ada dalam setiap penulisan sejarah sebab peristiwa sejarah dalam arti obyektif (aktualitas) diamati, dan masukan

tersebut tidak pernah tetap murni tetapi telah diberi warna sesuai dengan selera subyek<sup>46</sup>.

Interpretasi, eksplanasi sintesis atau analisis yang bertujuan untuk menangkap apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Dalam tahap ini dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Oleh sebab itu di dalam interpretasi ini perlu dilakukan analisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah, sebab unsur subyektifitas dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa jaman, kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial dan agama yang melingkupi penulisnya.<sup>47</sup>

Demikian juga terhadap sumber-sumber yang digunakan oleh penulis, yaitu surat kabar Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, dan New York Time, termasuk juga sumber buku yaitu, *The Rise and Demise Democratic of Kampuchea, When The War Was Over*, maupun *History of Cambodia*. Penulis berusaha untuk mengurangi setiap unsur subjektif yang terkandung di dalam sumber-sumber tersebut.

Mengurangi unsur subyektifitas dalam sumber yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dilakukan dengan cara membaca sumber dan apabila terdapat sudut pandang penulis mengenai peristiwa yang berlangsung yaitu pemeritahan Pol Pot, maka dilihat apakah sudut pandang tersebut sesuai

---

<sup>46</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992 hal 62

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 72.

dengan keadaan yang sesungguhnya dan berhubungan dengan peristiwanya tersebut, selain itu analisis yang terdapat dalam sumber itu dapat diterima sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat diterima dengan akal pikiran.

Sebagai contoh, pada sumber surat kabar di mana unsur subyektifitas sangat mempengaruhi, karena penulis surat kabar menulis berdasarkan pengamatannya, penulisnya mengatakan bahwa pemerintahan Pol Pot sangat kejam, hal ini dapat diterima karena pernyataan itu berdasarkan pengamatan dari beberapa peristiwa dan kebijakan pemerintahan Pol Pot itu sendiri yang menunjukkan kekejaman-kekejaman yang dilakukan, seperti pembunuhan, penghapusan agama dan masih banyak lagi, sehingga selama Pol Pot berkuasa tiga juta penduduknya telah menjadi korban.

#### 4. Historiografi

Langkah atau tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Dimana historiografi tersebut merupakan suatu proses penulisan sejarah dimana isinya merekonstruksi pada data-data yang telah teruji kebenarannya dan hasilnya adalah suatu penulisan yang bersifat destruktif analisis.

Cara penulis dalam menyusun skripsi ini adalah secara kronologis dan sistematis serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini dapat dilihat dari urutan peristiwa yang ditulis berdasarkan kronologi tahunnya, yaitu berawal dari awal pemerintahan Pol Pot sampai akhir pemerintahannya, yaitu yang di mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1979.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan politik dan sosiologis. Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui keadaan politik di Kamboja beserta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kamboja dalam hal ini adalah pemerintahan Pol Pot. Disamping itu juga pendekatan politik ini digunakan juga untuk mengetahui strategi-strategi pemerintahan itu agar tujuan negara dapat tercapai.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui gejala-gejala maupun perubahan sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Pol Pot. Karena pada masa pemerintahan Pol Pot ini banyak menimbulkan kesengsaraan yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.

#### H. Sistematika Penulisan

Di dalam memberikan uraian yang mengkaji mengenai Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tahun 1975 – 1979, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan pendekatan, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan di Kamboja situasi Kamboja dan situasi pemerintahannya pada masa tersebut. Sehingga Pol Pot dapat menjadi orang yang paling berkuasa yang memimpin jalannya pemerintahan di Kamboja. Atau dengan kata lain mengkaji



mengenai kudeta yang dilakukan oleh Pol Pot sehingga ia dapat menjadi presiden di Kamboja.

Bab III, membahas mengenai usaha-usaha atau langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh Pol Pot di dalam menjalankan pemerintahannya di Kamboja, yang berhubungan dengan berbagai kebijaksanaan politik yang diambil oleh Pol Pot yang digunakan untuk menegakkan eksistensi dari pemerintahannya tersebut dan hal tersebut sangat berdampak pada situasi Kamboja yang semakin tidak menentu.

Bab IV, pada bab ini membahas mengenai akhir dari pemerintahan Pol Pot di Kamboja, yang berawal adanya berbagai reaksi yang muncul terhadap pemerintahan tersebut, dan reaksi tersebut datang dari berbagai pihak, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri atau rakyat Kamboja sendiri yang tidak tahan terhadap pemerintahan Pol Pot yang diktator dan kejam. Sampai pada akhirnya Heng Samrin dengan dukungan Vietnam naik menjadi pemimpin Kamboja menggantikan rezim yang kejam.

Bab V, penutup berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulisan skripsi ini serta satuan aplikasi pengajaran.

## BAB II

### PROSES MUNCULNYA POL POT DALAM PEMERINTAHAN DI KAMBOJA

#### A. Situasi Kamboja Menjelang Munculnya Pol Pot

Proses Pol Pot di dalam pemerintahan di negeri Kamboja tidak terlepas dari peranan Pol Pot sendiri di dalam Khmer Merah yang ikut terlibat di dalam kehidupan politik di pemerintahan Kamboja. Karena melalui kelompok Khmer Merah itulah Pol Pot bersama teman-temannya berhasil melakukan penggulingan pemerintahan atau yang disebut kudeta terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh Lon Nol.

Khmer Merah sendiri pada waktu itu merupakan suatu kelompok yang berhaluan komunis, karena terdiri dari anggota-anggota yang berpandangan komunis, di mana Khmer Merah sendiri dipimpin oleh tiga serangkai yang sangat berpengaruh dalam kelompok tersebut, yaitu Pol Pot, Ieng Sary, dan Khieu Shampin. Pol Pot tersebut mengakui bahwa sebenarnya Partai Komunis Kamboja sudah berkembang selama tujuh belas tahun dan berjuang sebagai gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk merebut kekuasaan.<sup>48</sup>

Hal tersebut dilakukan karena Partai Komunis Kamboja tidak puas dan merasa tidak cocok dengan pemerintahan yang ada pada waktu itu, sebab tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dan pandangan komunis karena sebelumnya pemerintahan yang berlangsung menggunakan paham liberalis di bawah pengaruh Amerika Serikat. Oleh sebab itu Partai Komunis Kamboja merasa

---

<sup>48</sup> *Kompas*, 17 April 1978.

perlu untuk melakukan perlawanan-perlawanan demi tercapainya tujuan dan cita-cita yang sesuai dengan pandangan dan ajaran-ajaran komunis. Meskipun perlawanan dan perjuangan yang dilakukan tersebut bersifat "under ground" atau secara sembunyi-sembunyi tetapi gerakan-gerakannya berusaha untuk menggerogoti dan meneror pemerintahan yang sedang berlangsung.

Pada waktu itu Khmer Merah dibawah pimpinan Khieu Shampin mengorganisasikan dan mengatur segala gerak-gerik dan tindakan yang dilakukan oleh Khmer Merah itu. Tetapi pada perkembangannya di dalam tubuh Khmer Merah tersebut orang yang paling berperan selain Khieu Shampin terdapat juga Pol Pot dan Ieng Sary. Namun akhirnya Pol Pot menjadi orang yang paling mendominasi Khmer Merah maupun Partai Komunis Kamboja, dia juga yang sangat berperan aktif di dalam usaha untuk menggulingkan pemerintahan Lon Nol. Pimpinan Khmer Merah pada saat itu memang dipegang oleh Khieu Shampin, tetapi setelah Khmer Merah berhasil melakukan kudeta yang dipimpin oleh Pol Pot, maka Pol Pot pun dengan pengaruh-pengaruhnya dan dengan cerdik dapat duduk sebagai orang yang paling berkuasa di Kamboja, yaitu menjadi Perdana Menteri Kamboja. Sedangkan Khieu Shampin menjabat sebagai Presiden Demokratik Kamboja, tetapi peranannya sangat kurang di dalam jalannya politik pemerintahan Kamboja.

Di dalam Khmer Merah Pol Pot banyak sekali berperan sehingga hal tersebut menjadikan Khieu Shampin sebagai pemimpin Khmer Merah terkesan hanya sebagai simbol saja di dalamnya. Karena segala sesuatu Pol

Pot lah yang mempunyai peranan. Itulah sebabnya ketika Khmer Merah berhasil menggulingkan pemerintahan Lon nol, bukan Khieu Shampin yang duduk sebagai penguasa di Kamboja untuk menggantikan Lon Nol. Di mana Khieu Shampin sendiri merupakan pemimpin dari Khmer Merah. Tetapi Pol Pot lah yang berkuasa di Kamboja karena Pol Pot sendiri mempunyai peran yang besar terhadap Khmer Merah ia juga banyak menyumbangkan pokok-pokok pikirannya terhadap Khmer Merah atau pun Partai Komunis Kamboja, sehingga menjadikan Khmer Merah semakin besar. Pokok-pokok pikiran yang ia sumbangkan yaitu mengenai langkah-langkah Khmer Merah di dalam negara Kamboja agar Khmer Merah dapat menjadi kelompok yang paling berkuasa di negeri itu. Maka Khmer Merah pun dapat masuk ke dalam kancah politik di negeri Kamboja kemudian melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung termasuk berusaha menjatuhkan pemerintahan itu. Selain itu juga melakukan usaha penyerangan-penyerangan yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan sebelumnya yaitu pemerintahan Lon Nol, selain itu gerakan-gerakan bawah tanah yang dilakukannya tersebut banyak berpengaruh terhadap politik pemerintahan. Oleh sebab itu Pol Pot mampu menjadi penguasa di negeri Angkor tersebut.

Dalam upaya merebut kekuasaan dari pemerintahan yang tengah berlangsung pada waktu itu, dalam hal ini adalah pemerintahan yang dijalankan oleh Lon Nol. Pol Pot beserta kelompoknya di dalam Khmer Merah yang terdapat juga Ieng Sary dan Khieu Shampin, didalam melakukan aksi kudeta itu atau perebutan kekuasaan itu Pol Pot yang tergabung dalam Khmer

Merah ternyata didukung oleh negara RRC yang juga merupakan suatu negara di Asia yang menggunakan paham komunis di dalam pemerintahannya. Cina melakukan dukungan terhadap tindakan kudeta yang dilakukan oleh Pol Pot dan kawan-kawannya karena Pol Pot menyatakan bahwa ia anti terhadap federasi yang diusulkan oleh Vietnam, mengenai hal ini tidak diungkapkan oleh Vietnam secara langsung terbuka. Usaha tersebut ternyata juga mendapat dukungan yang berasal dari Thailand, karena Thailand sendiri merasa khawatir akan adanya arus penetrasi atau penanaman pengaruh Vietnam ke wilayah Thailand.<sup>49</sup> begitu pun juga Cina, yang pada waktu itu juga terlibat persekutuan dengan Vietnam, disamping itu Cina mau mendukung Kamboja karena Kamboja di bawah rejim Pol Pot menggunakan paham komunis dan tindakan-tindakan mereka ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Mao yang berasal dari Cina.

Selain di dukung oleh RRC, Pol Pot beserta kawan-kawannya yang berada di dalam tubuh Khmer Merah juga mendapat dukungan dari negara-negara komunis lainnya, yaitu berasal dari negara Uni Soviet dan Vietnam Utara. Mereka mau membantu Pol Pot karena Khmer Merah merupakan suatu organisasi dan partai politik yang berhaluan komunis. Apalagi pemerintahan yang akan di gulingkan merupakan pemerintahan yang menggunakan paham liberal yang mendapat pengaruh dari Amerika Serikat. Negara-negara komunis membantu kudeta tersebut dengan tujuan agar pengaruh komunis dapat juga disebarkan di wilayah Kamboja, sehingga paham komunis akan

---

<sup>49</sup> Harry Kawilarang, *Dunia di Tengah Kemelut*, Jakarta, UI Press, 1975, hal. 139.

dapat bertambah daerah pengaruhnya. Hal ini juga berhubungan dengan Perang Dingin yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat yang menanamkan paham liberalis kapitalisme dan Uni Soviet menanamkan paham sosialis komunisme. Negara-negara komunis itu memberikan bantuan berupa persenjataan untuk usaha penyerangan terhadap pemerintahan Lon Nol, dan pada akhirnya Lon Nol dapat melarikan diri dari Kamboja kemudian digantikan oleh Pol Pot dan kawan-kawannya.

Setelah Pol Pot beserta kawan-kawannya tersebut berhasil di dalam usahanya untuk menguasai wilayah Kamboja dan menduduki kursi pemerintahan itu, maka dengan segera membentuk suatu pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Demokratik Kamboja. Kemudian dibentuklah suatu susunan kabinet baru yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di dalam negara Kamboja itu.

Mereka yang termasuk dan duduk dalam pemerintahan yaitu “

1. Khieu Shampin sebagai presiden Demokratik Kamboja
2. Pol Pot sebagai Perdana Menteri
3. Ieng Sary sebagai Wakil Perdana Menteri
4. Son Sen sebagai Menteri Pertahanan
5. Vorn Veth yang menangani masalah Ekonomi
6. Ieng Thirith (istri Ieng Sary) menangani masalah sosial
7. Yun Yet (istri Son Sen) menjabat sebagai Kepala Kebudayaan

8. Pol Pennary (istri Pol Pot) sebagai ketua Asosiasi Wanita Demokratik Kamboja.<sup>50</sup>

Terlihatlah dari struktur organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan yang baru tersebut, ternyata berisikan para teman dekat dan kerabat yang menjabat di dalam kursi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kolusi di terapkan di dalam menjalankan pemerintahan yang tengah di bangun. Karena dengan menggunakan sistem kolusi yang menempatkan temen-teman dekat dan keluarga ini tidaklah sesuai dengan suatu bentuk pemerintahan yang mereka namai Pemerintahan Demokratik Kamboja karena segala sesuatunya telah diatur oleh orang yang berkuasa di dalam negara dan pemerintahan tersebut, dalam hal ini aspirasi rakyat maupun peran serta rakyat di dalam menjalankan pemerintahan tidaklah diperhatikan. Pemerintahan yang di jalankan tersebut merupakan suatu pemerintahan yang bersifat diktatur, rakyat harus tunduk dengan segala peraturan yang telah ditetapkan, apabila terdapat orang-orang yang tidak senang terhadap pemerintah, maka dengan segera akan diambil tindakan untuk melenyapkannya. Peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memperhatikan pendapat atau aspirasi rakyatnya karena segala keputusan berada di tangan pemerintah pusat.

Sekali lagi ternyata rakyat Kamboja mengalami pergantian kekuasaan, dimana pergantian kekuasaan yang dilakukan merupakan hasil dari kudeta atau penggulingan kekuasaan yang dilakukan secara paksa oleh pihak-pihak

---

<sup>50</sup> raig Etchson, *The Rise and Demise of Democratic Kampuchea*, Colorado, West View Press, 1984, hal. 173.

yang berkepentingan, seperti halnya pergantian kekuasaan yang terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, juga dilakukan secara kudeta. Di dalam menjalankan pemerintahan tersebut, maka Pol Pot mengajak orang-orang terdekatnya untuk ikut ambil bagian di dalam pemerintahannya. Pol Pot sebagai Perdana Menteri ataupun penguasa di Kamboja, maka ia menunjuk Ieng Sary sebagai wakilnya di dalam pemerintahannya, karena Ieng Sary dikenal dekat sekali dengan Pol Pot apabila dibandingkan dengan Khieu Shampin. Kedekatan dengan antara Pol Pot dengan Ieng Sary tersebut lebih dikarenakan adanya hubungan keluarga antar mereka. Di mana mereka berdua yaitu antara Pol Pot dan Ieng Sary terdapat hubungan kakak ipar. Karena antara istri Pol Pot dan Ieng Sary merupakan kakak adik kandung yang merupakan keturunan Cina.

## **B. Pengaruh Komunis Cina Terhadap Pol Pot**

Telah kita ketahui bahwa Cina merupakan pengikut ajaran komunis, tetapi paham komunis yang berkembang di Cina bukanlah komunis seperti yang terdapat di negara-negara Eropa Timur khususnya, yang ajarannya berdasarkan pada Marxisme. Komunis Cina lebih menitik beratkan gerakan-gerakan revolusinya pada kaum petani sedangkan pada negara-negara komunis lainnya gerakannya berorientasi pada kaum buruh pabrik.

Paham komunis yang terdapat di Cina dikembangkan oleh seorang tokoh besar dan berpengaruh di dalam politik negara Cina, yaitu Mao Zedong. Mao Zedong merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Cina. Dia

memberikan pandangan-pandangan yang digunakan sebagai dasar perjalanan politik Cina. Pandangan-pandangannya terdiri dari empat hal yaitu;

1. Peranan desa lebih penting daripada kota
2. Tentara Merah lebih penting daripada aksi massa
3. Semangat revolusi lebih penting daripada keahlian teknis
4. Kekuatan subyektif lebih penting daripada kenyataan obyektif

Paham atau ajaran Mao ini menjadi suatu pedoman dari segala kebijakan politik yang dilakukan oleh Partai Komunis maupun pemerintah. Ajaran-ajaran Mao tersebut berkembang dengan baik di negeri Cina, karena Mao sendiri merupakan seorang tokoh yang besar dan amat disegani di negara-negara lain. Bahkan sampai dia meninggal pun pengaruh Mao masih dapat dirasakan amat besar mempengaruhi kehidupan politik Cina. Hal ini terlihat bahwa ajaran-ajaran Mao masih digunakan atau masih berkembang walaupun Mao sendiri sudah tiada.

Pengaruh ajaran Mao yang berbasis pada paham komunis yang berkembang di Cina, ternyata juga telah mempengaruhi sejumlah tokoh yang ada di negara-negara lain, sehingga mereka pun menjadi pengikut-pengikut Mao yang kemudian menerapkan ajaran-ajaran Mao tersebut ke dalam negaranya. Negara yang mendapatkan pengaruh dari Cina dengan ajarannya yang berasal dari Mao yaitu Kamboja. Kamboja mendapat pengaruh dari Cina karena tokoh-tokoh komunisnya, terutama Pol Pot merupakan seorang pengikut Mao.

Setelah Pol Pot berkuasa di Kamboja, kebijakan-kebijakan politiknya selalu didasarkan pada ajaran Mao tersebut. Pol Pot cenderung berkiblat pada Cina, terutama komunis Cina karena paham komunis Cina yang berkembang tersebut dirasa sangat sesuai dengan keadaan Kamboja, disamping itu Pol Pot merupakan seorang pengagum dan menjadi pengikut setia Mao.

Pengaruh dari Cina khususnya ajaran Mao dapat dilihat dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengikuti doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh Mao. Hal ini dapat dilihat yaitu, pada Doktrin bahwa peranan desa lebih penting daripada kota, di mana Mao berpandangan bahwa petani merupakan suatu kekuatan yang paling utama dalam perjuangan revolusioner, dan kepemimpinan dalam perjuangan itu harus muncul dari kelompok petani. Mao telah memutarbalikkan pengutamaan-pengutamaan yang dicanangkan oleh Marx. Jadi menurut Mao, revolusi akan berhasil di wilayah pedesaan sebelum kota-kota dan di negara terbelakang sebelum di negara-negara industri pusat. Mao sesungguhnya menyesuaikan Marxisme dengan kondisi dunia ketiga.<sup>51</sup> Demikian juga halnya dengan Pol Pot yang melakukan pengosongan terhadap kota-kota besar agar penduduknya tinggal di desa-desa atau wilayah pedalaman Kamboja. Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar masyarakat yang terbentuk merupakan masyarakat petani dan kelas-kelas sosial tidak terbentuk sehingga gerakan revolusi dapat diorientasikan pada masyarakat petani.

---

<sup>51</sup> William Ebenstein and Edwin Fogelman, *op.cit*, hal 87.

Doktrin Mao lainnya yang mempengaruhi jalannya pemeritahan di Kamboja yaitu mengenai Tentara Merah lebih penting daripada aksi massa. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh dukungan penduduk lokal, tapi terutama oleh efektivitas Tentara Merah sebagai suatu organisasi militer. Perang revolusi yang berlarut-larut selama beberapa dasawarsa tidak dapat dimenangkan oleh rakyat, dan hanya tentara yang dapat memenangkan perjuangan seperti itu. Pemikiran ini merupakan dasar pijakan Mao dalam pernyataan bahwa “menurut teori Marxis tentang negara; siapa pun yang ingin merebut dan memegang kekuasaan politik dalam negara; siapa pun yang ingin merebut dan memegang kekuasaan politik haruslah memiliki tentara yang kuat”.<sup>52</sup> berdasarkan pernyataan tersebut mempengaruhi Pol Pot dalam pemerintahannya untuk memperkuat tentaranya dengan membentuk suatu organisasi militer di Kamboja, selain itu juga peranan tentara Khmer Merah yang sangat membantu untuk mempertahankan pemerintahannya yang sedang berlangsung tersebut, sebab tentara Khmer Merah di bawah perintah Pol Pot untuk kepentingan-kepentingan negara maupun partai.

Ajaran atau doktrin selanjutnya yang mempengaruhi jalannya pemerintahan Kamboja dibawah Pol Pot yaitu, semangat revolusi lebih penting daripada keahlian teknis. Bahwa Mao mendambakan munculnya manusia jenis baru dengan sikap, hasrat, dan perilaku yang istimewa. Menurutnya seorang komunis sejati tidak pernah memisahkan diri dari massa rakyat, tetapi secara langsung terlibat dengan kehidupan mereka,

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

mendengarkan dan menanggapi kebutuhan-kebutuhannya, dan turut ambil bagian dalam pekerjaan dan kebudayaannya. Menciptakan masyarakat yang benar-benar komunal itu merupakan tujuan revolusi yang secara giat harus diperjuangkan oleh kaum komunis.<sup>53</sup> Pada pemerintahan Pol Pot ajaran ini dilakukannya dengan membentuk suatu masyarakat yang komunal di desa-desa walau pun secara paksa. Dan seseorang yang mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu tidaklah dihargai karena setiap orang dipandang sama dalam segala hal, dan semua masyarakat harus mau mendukung jalannya revolusi yang dilakukan oleh pemerintah.

Ajaran lainnya yang mempengaruhi pemerintahan Pol Pot yaitu, kekuatan subyektif lebih penting daripada kenyataan obyektif. Unsur yang khas dalam Maoisme ialah penegasannya bahwa terdapat kemungkinan mencapai perubahan yang revolusioner melalui penerapan sifat, kemauan, dan "pikiran yang benar" dalam berbagai kondisi historis. Unsur kesukarelaan dalam Marxisme, yaitu pandangan bahwa perubahan merupakan hasil dari tindakan-tindakan manusia yang direncanakan dan bukannya secara obyektif ditentukan oleh kondisi-kondisi masyarakat, yang telah dikembangkan oleh Lenin. Namun demikian Mao menggunakannya secara lebih luas lagi, seperti yang nampak dari uraiannya mengenai kelompok masyarakat yang dapat menjadi bagian dari gerakan revolusioner.<sup>54</sup> Dalam pemerintahan Pol Pot kekuatan subyektif yang dikembangkan adalah dengan meyakinkan kepada rakyat Kamboja bahwa pemerintahannya merupakan yang terbaik di mana

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 89.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 91.

pernyataan tersebut di sampainya pada kaum muda pada khususnya dengan tujuan agar para kaum muda mau mendukung revolusi yang tengah berlangsung, karena pemerintahan Pol Pot ingin membentuk suatu masyarakat Kamboja yang beisikan generasi muda dengan membunuh penduduk yang sudah tua. Maka semangat yang subyektif di sini lebih mempunyai peranan yang penting bila dibandingkan dengan kenyataan yang sesungguhnya atau kenyataan obyektif bahwa pada pemerintahan Pol Pot merupakan sebuah pemerintahan yang sangat kejam dan diktatur.

Dari penjelasan di atas terlihatlah bahwa Pol Pot dalam menjalankan pemerintahannya sangat di pengaruhi oleh komunis Cina yang dikembangkan oleh Mao Zedong. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semua berorientasikan pada ajaran Mao, sehingga terlihat bahwa Kamboja merupakan sebuah negara yang menjadi ladang realisasi atau praktek dari ajaran komunis Cina di bawah pengaruh Mao.

### **C. Sikap Pol Pot Terhadap Negara-Negara Pendukungnya**

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintahan Pol Pot yang tengah berkuasa itu, tidak lagi menunjukkan dukungannya terhadap negara-negara komunis yang tandainya dengan membantu Pol Pot dan kawan-kawannya di dalam usaha menjatuhkan kekuasaan pemerintahan Lon Nol. Pemerintahan Pol Pot justru mengusir dan mendepak Vietnam dan Uni Soviet tersebut dari Kamboja. Pemerintahan Pol Pot tidak ingin di pengaruhi oleh negara-negara tersebut karena pengaruh-pengaruh dari negara-negara itu tidak sesuai dengan

apa yang diinginkan oleh Pol Pot dan pemerintahannya itu. Sebaliknya yang dilakukan oleh pemerintahan Pot Pot terhadap RRC. Pol Pot dan pemerintahannya hanya merangkul RRC di antara negara-negara komunis yang ada. Pol Pot pun kemudian banyak melakukan hubungan-hubungan dengan RRC. Hal tersebut dilakukan karena RRC menurut Pol Pot maupun pemerintahannya merupakan sebuah negara yang berpaham komunis, di mana pandangan-pandangannya dinilai paling sesuai dengan Kamboja. Sehingga pandangan-pandangan RRC banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan Kamboja di bawah Pimpinan Pol Pot dan Ieng Sary. Pandangan politik RRC yang dijadikan pedoman bagi jalannya pemerintahan di Kamboja yaitu pemikiran-pemikiran yang berasal dari tokoh komunis RRC yang terkenal yaitu Mao Zedong.<sup>55</sup> Menurut pandangan Mao Zedong bahwa orang-orang Tionghoa tersebut tidak dapat hidup hanya dengan nasi. Bahwa masyarakat yang ada itu memerlukan kelakonan atau juga drama di dalam hidupnya. Dengan memakai pemikiran ini sebagai landasan kehidupan politiknya, maka disediakanlah penjahat-penjahat untuk dibunuh oleh rakyat. Agar permainan tersebut menjadi tidak membosankan maka pemerintah melahirkan penjahat-penjahat tersebut dikalangan pimpinan partai. Disamping itu perkosaan dan hukuman mati yang dilaksanakan harus merupakan suatu impian mengenai suatu gerakan yang bertujuan terciptanya masa depan yang baik. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu berdasarkan pada asumsi bahwa jalan masyarakat manusia yang berkemanusiaan menuju kebahagiaan dan kemajuan itu haruslah

---

<sup>55</sup> *Merdeka*, 14 Mei 1979.

melalui kegoncangan dan revolusi. Karena tidak ada revolusi tanpa kegoncangan yang kejam.<sup>56</sup>

Berdasarkan pemikiran-pemikiran Mao itulah, Pol Pot dan Ieng Sary bertindak dengan tekun dan setia. Mereka ini menjalankan ajaran yang dihasilkan dari pemikiran Mao dengan sangat baik di dalam pemerintahannya, sehingga ajaran-ajaran Mao yang di gunakan sebagai landasan di dalam pemerintahan yang sedang berlangsung. Ajaran itu digunakan untuk suatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya merupakan sebuah kampanye yang digunakan untuk memusnahkan sesamanya. Terlebih lagi apabila mereka itu merupakan lawan-lawan politiknya yang berani menyatakan kritiknya ataupun pendapat-pendapatnya yang berbeda dan ditujukan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa di mana dalam hal ini merupakan pemerintahan Pol Pot dan Ieng Sary dengan menyatakan pendapatnya yang berbeda itu maka mereka dianggap sebagai penyeleweng atau pemberontak negara yang perlu dilenyapkan karena dapat merintangi segala kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Karena setelah berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya, tindakan yang dilakukan oleh Pol Pot bersama rekan-rekannya untuk pertama kalinya yaitu menjalankan cita-cita Mao Zedong mengenai cara-cara menciptakan ketentraman dan kepatuhan yang sempurna, dimana semua hal tersebut sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Mao, yaitu setiap desa memerlukan masa terror, maka agar terwujud hal tersebut harus dilakukan dengan menembak beberapa orang penjahat maupun

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

penindas pada setiap wilayah. Hanya dengan cara inilah menindas perlawanan maupun reaksi yang terdapat di dalam masyarakat itu. Sebab setiap daerah itu memerlukan satu kesatuan untuk memberantas revolusi dan tantangan atau kontra revolusi.<sup>57</sup> sehingga keadaan suatu daerah dapat diatur dengan baik oleh pemerintah.



---

<sup>57</sup> *Merdeka*, 14 Mei 1979.

**BAB III**

**USAHA-USAHA YANG DIJALANKAN POL POT DALAM  
MENJALANKAN PEMERINTAHAN DI KAMBOJA**

**A. Kebijakan-Kebijakan Pol Pot**

Setelah Pol Pot berhasil menduduki jabatan Perdana Menteri Kamboja dan dengan menunjuk Ieng Sary sebagai wakilnya, maka ia pun berusaha untuk menjalankan kebijakan-kebijakan ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan eksistensinya di dalam kancah politik di negara Kamboja yaitu menjadikan seperti apa yang ia kehendaki.

Pol Pot pada dasarnya adalah pengikut ajaran Mao Zedong yang setia dan tekun, oleh sebab itu ia menggunakan ajaran-ajaran maupun pandangan Mao sebagai dasar di dalam menjalankan politik pemerintahannya di negara Kamboja. Maka Pol Pot menjalankan usaha-usaha atau langkah-langkah yang berguna untuk menegakkan pemerintahannya.

Seperti yang telah disebutkan di atas, menurut Mao Zedong di dalam kehidupan ini memerlukan suatu drama atau tindakan yang direncanakan oleh pemerintah yang dipakainya sebagai landasan dalam menjalankan politiknya itu. Untuk mewujukannya, maka ia pun menyediakan penjahat-penjahat yang bertujuan untuk dibunuh oleh rakyat, penjahat-penjahat tersebut dari kalangan rakyat, partai, maupun juga berasal dari luar partai.

Hukuman mati yang dilaksanakan tersebut harus merupakan suatu impian mengenai suatu gerakan yang bertujuan untuk hari depan yang lebih

baik bila dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya. Jadi dengan melakukan hukuman mati berdampak pada keadaan masyarakat yang lebih baik dari sebelum diadakannya hukuman mati tersebut, karena orang yang dihukum mati merupakan orang-orang penjahat yang memang pantas untuk mendapatkan hukuman itu berdasarkan penilaian pemerintah yang ada pada waktu itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mao Zedong tersebut berdasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan bahwa jalan masyarakat manusia menuju terwujudnya suatu kebahagiaan dan kemajuan di dalam kehidupannya itu haruslah melalui jalan kegoncangan dan revolusi. Karena tidak ada revolusi yang berjalan tanpa suatu kegoncangan dan revolusi yang sifatnya sangat kejam. Berdasarkan anggapan tersebut, menyebabkan Mao Zedong melancarkan berbagai kampanye dan gerakan nasional langsung, dimana hal tersebut terjadi sejak Republik Rakyat Tiongkok diproklamasikan. Dari peristiwa tersebut menyebabkan negara menjadi tergoncang sendi-sendi kehidupannya termasuk juga pada sendi kehidupan politiknya, sehingga keadaan politik negara itu menjadi terganggu. Akibat yang lebih terlihat di dalam kehidupan negara Cina yaitu 50 juta manusia telah kehilangan nyawanya.<sup>58</sup>

Di dalam masa kampanye yang dilakukan tersebut seluruh negara yang melakukan hukuman mati di depan umum dilaksanakan terhadap tuan tanah,

---

<sup>58</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

petani kaya, pedagang, industrialis, di mata Mao mereka itu mempunyai satu kesamaan yaitu penyeleweng yang harus segera ditindak tegas.<sup>59</sup>

Pol Pot dan Leng Sary yang merupakan pengikut-pengikut ajaran Mao yang setia dan tekun juga mempergunakan ajaran tersebut untuk memusnahkan sesamanya, apabila orang-orang tersebut memberikan suatu pendapat yang berbeda atau bahkan menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pol Pot.

Setelah berhasil merebut kekuasaan atau kudeta dari pemerintahan Lon Nol, tindakan yang dilakukan oleh Pol Pot bersama teman-teman politiknya pertama-tama adalah menjalankan cita-cita Mao. Dengan kata lain yang sederhana, setiap desa memerlukan suatu masa terror. Selanjutnya "nasehat" itu berbunyi : "sekurang-kurangnya beberapa orang jagoan dan penindas harus ditembak dan di setiap wilayah. Hanya inilah cara untuk menindas perlawanan atau reaksi yang terdapat di setiap daerah itu. Setiap daerah memerlukan satu kesatuan untuk memberantas revolusi-tantangan (kontra—revolusi).<sup>60</sup> Dengan begitu pemerintah berhak melakukan suatu pembersihan terhadap para penjahat maupun orang-orang yang melakukan perlawanan dan tentangan terhadap pemerintah. Di mana perlawanan yang dilakukan tersebut berada di suatu wilayah yang terdapat di dalam negara, agar di dalam masyarakat itu dapat tercipta suatu keadaan yang lebih baik dan terwujud suatu kemajuan di bidang-bidang kehidupan masyarakat itu. Karena orang-orang yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

menghalangi segala gerak pemerintah telah dilenyapkan bersamaan dengan politik pembersihan itu.

Pol Pot di dalam menjalankan pemerintahannya itu selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Mao, termasuk juga di dalam langkah-langkah yang diambilnya yaitu melakukan usaha-usaha pembersihan, di mana pembersihan yang dilakukan tersebut terdiri dari tiga tingkat pembersihan. Pembersihan harus dilaksanakan karena berdasarkan pada pandangan Mao yaitu, harus diambil tindakan agar terlaksana gelombang yang tidak boleh menurun sebelum diikuti oleh gelombang lain. Hal itu dilakukan agar eksistensi atau keberadaan negara tetap terjaga dan dapat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Hegel di mana ia berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk memaksakan keinginannya kepada warganya, di sini Pol Pot memaksakan kehendaknya untuk melakukan upaya-upaya pembersihan kepada orang-orang yang dianggap sebagai penyeleweng negara.

Pembersihan yang dilaksanakan oleh Pol Pot dan teman-teman politiknya itu pertama kali dilakukan pada tahun 1975. Pembersihan tersebut diarahkan terhadap kaum intelegent atau orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik di dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan dan memberikan suatu sumbangan di berbagai kehidupan itu. Tokoh yang mendapat tindakan tersebut yang berkaitan dengan politik pembersihan adalah bekas perwira dan pejabat pemerintahan yaitu Lon Nol. Pembersihan yang kedua dilakukannya pada tahun

1977 dimana hal tersebut ditujukan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai penyeleweng di dalam tubuh Khmer Merah, yaitu terhadap perwira pemimpin dari pasukan Khmer Merah itu sendiri, yang dicurigai mengadakan persekongkolan untuk melakukan penentangan maupun pemberontakan terhadap pemerintah. Dan pembersihan yang terakhir disebut sebagai revolusi sosial, pembersihan ini bertujuan untuk menyingkirkan dan membasmi para penyeleweng atau pemberontak yang berada di tengah-tengah kaum petani dan buruh.

Melalui pembersihan tersebut, maka diharapkan akan tercipta suatu masyarakat yang teratur tanpa adanya hambatan atau gangguan, sehingga masyarakat yang ada dapat dibentuk sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah yaitu menciptakan suatu masyarakat komunis. Dengan tidak adanya para pemberontak atau orang-orang yang dianggap sebagai penyeleweng tujuan negara dapat tercapai, karena tidak ada yang menghalangi segala gerak-gerik pemerintah yang pada waktu itu bersifat diktatur dan kejam.

## **B. Langkah-Langkah Pol Pot Dalam Melaksanakan Cita-Citanya**

### **1. Melaksanakan Pembunuhan Secara Massal (Genocide)**

Menurut Mao Zedong, penyebab dari kegagalan politiknya yang bertajuk "Melangkah Maju Besar" tersebut yaitu terdapatnya penduduk yang sangat besar sehingga menimbulkan suatu permasalahan tambahan yang menghalangi kemajuan otonomi, karena dengan jumlah penduduk yang banyak permasalahan sosial akan semakin kompleks apalagi dengan

jumlah lapangan pekerjaan yang kurang, sehingga menyebabkan kesejahteraan rakyat sendiri menurun. Berdasarkan pendapat tersebut, maka ia mengajukan suatu rencana yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut yaitu mengurangi jumlah penduduk dilakukannya dengan memberikan suatu pernyataan yang berbunyi “mati adalah kegembiraan” ketika dimulai kampanye untuk membatasi kelahiran, Mao berkata “Saya setuju untuk merayakan sebagai hari gembira kematian seseorang di atas 50 tahun”. “Kematian seseorang adalah hal yang biasa. Akhirnya, kemanusiaan sebagai satu kesatuan telah disumpah untuk musnah “. Kematian mempunyai segi yang positif. Seseorang itu dapat menjadi rabuk . “Apabila ada orang yang mati perlu diadakan suatu pertemuan untuk merayakan kemenangan dialektika”<sup>61</sup>

Pol Pot dan Ieng Sary berpendapat bahwa Cina dapat mengatasi berbagai permasalahannya tersebut apabila Cina membunuh orang-orang yang telah berusia di atas 50 tahun. Maka Pol Pot dan Ieng Sary di sini belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Cina tersebut yaitu mereka berusaha untuk membatasi jumlah penduduk karena dengan penduduk yang besar menyebabkan suatu permasalahan sosial yang semakin rumit. Mereka pun berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan ajaran Mao itu di dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan begitu mulailah Pol Pot mengadakan pengurangan terhadap jumlah penduduk di

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

negaranya. Cara yang digunakan pemerintah Pol Pot untuk mengurangi jumlah penduduknya sangat kejam bila dibandingkan dengan Cina yaitu dengan melakukan pembunuhan massal yang di tujukan pada penduduknya sendiri.

Pemerintahan Pol Pot tersebut tidak merahasiakan politik pembunuhan massal tersebut. Malahan membuat suatu pengumuman resmi yang dikeluarkannya pada “Pertemuan Tentara Menang Gemilang” yang diadakan di Battambang di bulan Februari 1977, mengatakan bahwa dalam negeri setelah kekuasaan direbut, “2500 000 musuh telah dibinasakan di dalam negeri”. Pembunuhan ini dan kekejaman lainnya juga diumumkan diluar Kamboja.<sup>62</sup>

Pol Pot juga telah menutup rumah sakit dan telah banyak membunuh dokter-dokternya. Di samping menutup rumah sakit ia juga menutup sebuah Sekolah Menengah Atas yang merupakan sekolahan yang terbesar yang ada di Kamboja. Penutupan sekolahan itu bertujuan untuk menggunakan gedung sekolah tersebut sebagai sebuah penjara dan tempat penyiksaan maupun tempat interogasi. Sekolahan tersebut bernama “Tuol Soocy Prey” yang berada di jalan Toul Sleng, letak sekolahan itu agak strategis, karena tersembunyi dari jalan-jalan protokol yang lebar di Phnom Penh. Gedung sekolahan itu berbentuk huruf “U” dan berhalaman

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

luas yang kemudian dijadikan sebagai kuburan massal dari korban pembunuhan.<sup>63</sup>

Ruangan kelas pada sekolah itu dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan penjara, penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengikat pada tempat tidur besi dan dibunuh, ditusuk dengan senjata tajam, mematahkan leher, bahkan ada yang jatuhkan begitu saja dari tingkat tiga bangunan sekolah itu. Pada ruangan sentral instalasi listrik diubah menjadi ruangan interogasi, dengan menyambungkan kabel-kabel listrik pada kursi interogasi. Teknik-teknik pembunuhan yang menggunakan tiang gantungan, yaitu dengan cara bungkus plastik disarungkan ke kepala dan leher diikat, maka secara perlahan-lahan dengan sendirinya nafas pun akan habis dan akhirnya akan mati lemas. Tiang gantungan tersebut diletakkan di halaman sekolah itu.

Pada masa rejim Pol Pot berkuasa tersebut, maka telah banyak orang-orang yang terbunuh. Dari orang-orang penting pemerintahan atau politikus, aktivis, maupun para perwira, mereka yang dibunuh ini merupakan orang-orang yang dianggap melakukan penentangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Pol Pot. Mereka melakukan pemberontakan karena merasa tidak tahan terhadap rejim Pol Pot yang begitu kejam dan malah membuat kondisi politik Kamboja menjadi semakin kacau dan keadaan negara yang mencekam karena penduduknya merasa tidak aman lagi untuk tinggal di tanah airnya.

---

<sup>63</sup> *Sinar Harapan*, 14 Juni 1979.

Dari daftar nama-nama orang yang dibunuh pada masa pemerintahan Pol Pot, di mana orang-orang penting yang berhasil dibunuh pada masa pemerintahan itu, yaitu terdapat Duta Besar pada masa pemerintahan Lon Nol yaitu, Hout Sam Bath. Duta Besar Kamboja di Swiss terbunuh tanggal 9 September 1976, duta Besar Kamboja untuk Amerika Serikat I Siep Kanthy dan Duta Besar Kamboja untuk Aljazair, Cheu Ruth juga dibunuh tanggal 8 Desember 1976 yang sebelumnya disekap terlebih dahulu di dalam sel selain Duta Besar, juga telah membunuh sejumlah tokoh mahasiswa, yaitu Tep Sam An. Mahasiswa Fakultas kedokteran, mahasiswa farmasi, Huat Sovamna dan mahasiswa sastra Ham Sok Kong.<sup>64</sup>

Para intelektual atau tokoh-tokoh yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semua dibunuh. Di mana dari tokoh-tokoh tersebut terdapat Prof. Shing Tom dan Prof. Tith She, serta Hakim Cheng Chhonn Leang. Puluhan dokter juga telah dibunuh, Pol Pot juga melakukan pembunuhan terhadap prajurit-prajurit yang tidak mau bertempur dengan Vietnam, bahkan tentara-tentara Khmer Merah yang dianggap mempunyai hubungan yang dekat dengan Vietnam.<sup>65</sup>

Khmer Merah memiliki suatu slogan yang berfungsi untuk menyenyapkan penduduk Kamboja, slogan tersebut dijalankan dengan baik sehingga terlihatlah kekuatan dan sifat Khmer Merah yang bersifat sangat

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*



kejam tanpa memperhatikan hak-hak rakyat. Slogan tersebut berbunyi “Membiarkan kamu hidup tidak ada untungnya, menghancurkan kamu tidak ada ruginya”. Dengan adanya kalimat sakti tersebut, sedikitnya 1,5 juta jiwa melayang.<sup>66</sup>

Terlihatlah bahwa pada masa pemerintahan Pol Pot ini merupakan suatu pemerintahan yang sangat kejam. Karena telah banyak menghabiskan nyawa orang-orang yang dianggap membahayakan bagi pemerintahannya dan dianggap sebagai penyeleweng dan pemberontak dibunuh dengan cara-cara yang sangat kejam dan sadis serta tidak memperhatikan sendi-sendi kemanusiaan, sehingga dengan melakukan pembunuhan itu telah banyak orang-orang yang terpelajar dan berintelektual yang terbunuh, akhirnya habislah orang-orang terpelajar yang ada di negara Kamboja, kalau tidak terbunuh maka kebanyakan dari mereka itu dengan segera melarikan diri dari Kamboja, karena merasa negerinya tidak aman lagi, mereka pun mencari perlindungan diri untuk mempertahankan hidupnya. Pada umumnya mereka lari mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Laos.

Berdasarkan pada daftar nama-nama orang yang telah dibunuh pada masa pemerintahan Pol Pot maka dalam satu hari pemerintahan tersebut telah membunuh 200 sampai 400 orang. Langkah ini dilakukannya karena ingin merealisasikan ajaran Mao dimana pemerintahan Pol Pot tersebut hanya menghendaki penduduk Kamboja

---

<sup>66</sup> Sidney Scanberg, *Crimes Of War*, <http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/cambodia.htm>

yang berjumlah satu setengah juta saja. Baru kemudian mereka mendatangkan orang-orang yang berasal dari Cina untuk melakukan asimilasi dengan begitu akan terdapat pemurnian ajaran-ajaran dari Mao dan akhirnya cita-cita Mao Zedong dapat terealisasi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pol Pot. Dengan penduduk yang sedikit, maka akan sangat mudah membentuk suatu masyarakat komune yang berdasarkan masyarakat petani, dengan begitu pemerintah juga akan mudah mengaturnya.

Mao Zedong di Cina tidak melaksanakan pembunuhan secara massal, melainkan hanya memberikan pandangan mengenai jumlah penduduk yang seharusnya dikurangi yang dianggap sebagai penyebab gagalnya politik yang dijunta pada pemerintah Cina. Politik yang dilaksanakan dengan membunuh secara massal penduduk Kamboja oleh Pol Pot, disini pemerintah Pol Pot meniru politik yang dijalankan oleh Stalin dengan melaksanakan pembunuhan massal penduduk Rusia secara besar-besaran demi tercapainya tujuan negara yaitu membentuk masyarakat komunis dengan jumlah penduduk yang sedikit agar masyarakat dapat dengan mudah diatur oleh pemerintah.

## **2. Menciptakan Suatu Masyarakat Yang Tanpa Uang Tetapi Dengan Kerja Paksa.**

Para pengikut ajaran Mao di Kamboja mempercayai bahwa usaha-usaha yang dijalankan di Cina untuk membangun suatu masyarakat yang baru telah mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya

kalangan orang-orang borjuis atau orang-orang kaya dan telah dikeluarkannya undang-undang mengenai orang-orang borjuis yang boleh berkembang di negeri itu dengan memperkenalkan penggunaan sistem upah atau gaji. Sehingga sistem pembagian bebas ditinggalkan, yang mengakibatkan ruginya aktivitas atau rencana Mao untuk menata masyarakat berdasarkan prinsip-prinsipnya. Mao pun kemudian memberikan suatu pernyataan yang intinya untuk meninggalkan uang kertas, karena akan membuat uang tersebut dapat menguasai dan mengendalikan diri kita.

Penghapusan uang tersebut bertujuan agar tenaga buruh sukarela, tanpa batas dan upah, yang ada bekerja untuk kepentingan sosialisme dan komunis bukan untuk kepentingan mendapatkan upah atau gaji yang lebih tinggi. Karena uang merupakan sumber dari segala kejahatan. Di mana dengan uang dapat menyebabkan suatu kekacauan dalam setiap kehidupan masyarakat karena uang tersebut membuat manusia menjadi terobsesi untuk mendapatkan segala sesuatu, sehingga dapat menjadikan suatu masyarakat yang individualis yang hanya mendahulukan kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pihak swasta dan akhirnya masyarakat yang sifatnya sosialis tidak dapat terpenuhi. Di samping itu masyarakat yang akan terbentuk merupakan suatu masyarakat kota dengan industrialisasi sebagai dasar dari kehidupannya yang pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang kapitalis dengan menggunakan dasar-dasar liberalisme, hal ini tidak sesuai dengan

tujuan negara yang akan membentuk masyarakat komunis, apabila uang terus berkembang.

Pada masa pemerintahan Pol Pot ini kemudian membuang (mata) uang, dengan tujuan agar rakyat bekerja untuk negara dan pemerintah. Imbalan yang diterima oleh rakyat yang bekerja tersebut yaitu berupa makanan dan pakaian yang jumlahnya sangat terbatas bagi mereka, maka tidak heran kalau rakyat Kamboja pada waktu itu kekurangan bahan makanan. Pol Pot untuk merealisasikan hal tersebut yaitu mengganti upah dengan pembagian makanan kemudian memperkenalkan kantin bebas dan membatasi makanan sehari-hari. Kemudian Pol Pot pun membelokkan uang simpanan untuk keperluan yang lain, terlebih untuk kepentingan perang, di mana pada waktu itu Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tersebut terlibat perang dengan Vietnam mengenai masalah perbatasan antara kedua negara. Di samping itu biaya yang dipakai untuk pengadaan makanan dengan makanan yang biasa akan diperoleh biaya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan sistem upah atau gaji terhadap pekerjaan yang dilakukan.<sup>67</sup> Dengan begitu negara akan mendapatkan banyak keuntungan karena dapat menambah kas negara yang digunakan untuk keperluan yang lain.

Masyarakat yang bukan petani dapat mempertahankan diri dari rejim ini dengan memperhatikan dua faktor, yaitu (1) Kemampuan untuk dapat meninggalkan sikap borjuis, (2) Keberuntungan yang baik dengan

---

<sup>67</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

merahasiakan bahwa mereka merupakan orang-orang yang masuk dalam orang-orang yang berasal dari rejim Lon Nol.<sup>68</sup> Mereka ini dapat bertahan karena mau menuruti segala peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah dan lolos dari politik pembersihan yang dilakukan.

Langkah selanjutnya yang diambil untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut yaitu menghapuskan keluarga-keluarga yang ada, hal ini berdasarkan pada prinsip Mao yaitu "Biarlah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemesraan kemanusiaan dilenyapkan". Pol Pot pun menyamaratakan kehidupan masyarakatnya dengan kehidupan petani sepenuhnya. Pemerintah mencoba mengambil anak-anak untuk bekerja dan memaksa laki-laki dan perempuan untuk bekerja secara terpisah. Ini semua bertujuan untuk melenyapkan keluarga. Pejabat-pejabat yang mengurus hal ini menetapkan dan menjaga agar anggota keluarga tidak bertemu pada waktu bekerja. Pelanggaran atas undang-undang ini dapat dikarenakan hukuman mati.

Dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, disini pemerintah bermaksud baik, karena telah memberi rakyat cukup makan dan pemerintah hanya membunuh kader-kader atau aktivis yang tidak mendukung dilakukannya kudeta pada tanggal 17 April. Selama pemerintahannya, Pol Pot telah membunuh kader sekitar 20 sampai 30 persen, di mana pembunuhan dilakukan dengan diam-diam. Pemerintah juga telah membuat rakyat menderita dengan membuat rakyat bekerja

---

<sup>68</sup> Craig Etchson, *op. cit.*, hal. 146.

dengan sangat keras, karena mereka disuruh bekerja dua puluh jam satu hari dengan tidur hanya empat jam saja. Rakyat dipekerjakan untuk menemukan mata air dan menggali tanah untuk dibuat saluran-saluran air.<sup>69</sup>

Terlihat bahwa peran atau penguasa sangat terlihat dalam mendominasi untuk membentuk masyarakatnya, disini berarti bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar, seperti yang telah dirumuskan oleh Arif Budiman mengenai kekuasaan, dimana kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan itu dapat bersumber dari kekerasan fisik dan juga dapat bersumber pada kedudukan, kekayaan dan kepercayaan. Seperti juga halnya pemerintahan Pol Pot menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang untuk mengatur masyarakat Kamboja.

### **3. Penghapusan Kota-Kota.**

Dihapuskannya kota-kota yang ada di Kamboja karena kota-kota tersebut dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang membahayakan bagi negara dan pemerintahan, karena penduduk yang terdapat di kota dapat dengan mudah melakukan suatu gerakan sosial

---

<sup>69</sup> Elizabeth Becker, *When The War Was Over*.

maupun politik yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Desa di jadikan sebagai sebuah tujuan masyarakat yang dianggap sebagai suatu sekolah politik dan ideologi yang dapat mendidik setiap anggota anggota partai dengan baik.

Dengan kaum tani itulah kaum komunis dapat disesuaikan karena dapat bergabung dengan petani setengah proletar. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang kota dan orang desa, mereka kini sama kedudukannya.

Penghapusan kota itu juga disebabkan adanya suatu anggapan yang juga berasal dari ajaran Mao Zedong, yaitu bahwa setiap orang yang ingin hidup di kota-kota besar hanya bertujuan untuk mencari kesenangan-kesenangan saja di dalam kehidupannya dari pada digunakan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan untuk kepentingan negara dan pemerintah. Maka berhubungan dengan hal tersebut, agar masyarakat dapat dengan sungguh-sungguh bekerja maka semua orang yang tinggal di kota-kota besar haruslah dikeluarkan dan segera dikirm ke desa-desa atau pedalaman dimana pengiriman itu dilakukan dengan mengirimkan rombongan demi rombongan.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Khmer Merah setelah berhasil merebut pemerintahan adalah menculik, menggiring setiap orang keluar dari desa menuju kamp-kamp kerja paksa di pedalaman. Semua desa yang berada di pinggir jalan juga dikosongkan. Kamboja, pada masa

pemerintahan Pol Pot telah diubah menjadi sebuah kamp kerja paksa yang besar dibawah kekuasaan yang berasal dari “suatu kelompok tingkat tinggi” dan hal tersebut masih merupakan suatu bagian yang ringan masih ada hal-hal lain yang lebih buruk untuk dilakukan.<sup>70</sup>

Pol Pot dengan pemerintahannya kemudian melakukan pengiriman penduduk dari kota-kota ke desa-desa. Cara yang dilakukan oleh pemerintahan ini sangat kejam yaitu dengan cara melibatkan tentara Khmer Merah, tentara Khmer Merah kemudian melakukan tembakan-tembakan ke udara agar masyarakat yang ada di kota-kota itu menjadi takut dan dengan segera meninggalkan kota. Sehingga terkean bahwa kota-kota yang mereka tempati sudah tidak aman lagi.

Penduduk kota yang meninggalkan daerahnya tersebut tidak peduli yang muda, dan tua, yang sehat maupun sakit, pengusaha maupun pengemis, semuanya diancam dengan menggunakan senjata untuk menuju daerah-daerah pedalaman.<sup>71</sup>

Di dalam perjalanan menuju daerah-daerah pedesaan atau pedalaman, banyak, bahkan beribu-ribu orang yang mati di sepanjang jalan, karena lemah kehabisan tenaga, terluka dan lainnya disebabkan karena ditembak karena tidak menuruti perintah tentara Khmer Merah. Karena para penduduk itu meninggalkan tempat tinggalnya sebagian besar dengan berjalan kaki menuju desa-desa.

---

<sup>70</sup> Sidney Scanberg, op.cit.

<sup>71</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

Penduduk yang masih hidup ditempatkan di desa-desa dan komune pertanian yang ada di seluruh Kamboja. Kemudian mereka disuruh untuk bekerja dengan sekeras mungkin selama 16 atau 17 jam. Bahkan masih ada yang diambil dari rumahnya pada tengah malam oleh pasukan Khmer Merah untuk ditembak atau dipukul sampai mati karena tidak mengikuti perintah Khmer Merah tersebut.<sup>72</sup>

Penempatan penduduk kota-kota yang ada di Kamboja secara paksa ke desa atau pedalaman agar masyarakat komunis yang berbasis pada petani dapat tercipta, pemerintah Kamboja menggunakan salah satu sifat khusus negara yaitu sifat memaksa, dimana sifat ini dilakukan dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat dapat dilakukan, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti memiliki kekuasaan untuk memakai kekuasaan fisik secara legal. Pemerintah Pol Pot memaksa penduduk meninggalkan kota-kota dengan bantuan tentara Khmer Merah yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan senjata agar masyarakat tunduk dan menaati peraturan pemerintah.

#### • 4. Menghapuskan Agama.

Mao adalah seorang yang atheis yang kemudian berkembang menjadi benci terhadap agama. Mereka melarang upacara-upacara agama, menghancurkan berhala-berhala dan mereka melarang patung-patung yang merupakan manifestasi dari Tuhan yang diarak dari rumah ke rumah dan

---

<sup>72</sup> *Time*, 31 Juli 1978.

mengumpulkan dana. Patung-patung kayu itu dibelah-belah dan dijadikan kayu bakar. Mereka telah mencemarkan tempat-tempat yang dianggap suci.

Demikian juga halnya pada masa pemerintahan Pol Pot di Kamboja, mereka merendahkan agama dengan cara-cara yang sama, yaitu melarang adanya agama. Bhiksu Buddha dicabut dari kebhiksuannya dan patung-patung Buddha dihancurkan. Pagoda-pagoda dirobohkan atau dipergunakan sebagai tempat penyimpanan padi atau sebagai tempat lumbung padi. Penyembahan dan semua upacara agama dilarang sama sekali, kebanyakan pedada dihukum mati.

Masyarakat Kamboja merupakan masyarakat yang menganut agama Buddha, tetapi setelah Kamboja dikuasai oleh kelompok Khmer Merah, segala agama yang terdapat di Kamboja beserta kebiasaan tradisional yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat yang sifatnya turun temurun tidak diperbolehkan untuk berkembang bahkan hidup di negara itu. Sehingga masyarakat yang ada di bentuk sebagai suatu masyarakat yang tidak beragama atau atheis, karena pemerintah ingin membentuk masyarakat komunis yang berdasarkan pada materi untuk kepentingan negara. Dengan begitu agama di Kamboja tidak dapat berkembang, kuil-kuil Budha diratakan dengan tanah atau ditutup dan antara enam puluh ribu biarawan Budha hanya tiga ribu orang yang ditemukan masih hidup setelah pemerintahan Khmer Merah, sisanya

dibantai atau dijadikan pekerja paksa, sakit atau disiksa. Orang-orang Kamboja dan minoritas Muslim juga merupakan sasaran pembersihan.<sup>73</sup>

Pol Pot bersama dengan pemerintahannya juga bermaksud untuk mempengaruhi semua generasi muda Kamboja untuk dapat menerima pemerintahannya itu sebagai suatu pemerintahan yang terbaik yang pernah ada sebelumnya. Usaha yang dilakukannya untuk dapat mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menyebarkan cerita tentang masa lampau Kamboja dan meyakinkan masyarakat terutama kaum muda, dimana Kamboja yang dulu pernah berada dibawah Imperialis Amerika terdapat berbagai pengkhianatan kaum feodal, kaum modal, dan pemerias rakyat lainnya sehingga menyebabkan rakyat menderita, keadaan tersebut dibandingkan dengan keadaan pada masa pemerintahannya dimana masyarakat Kamboja diberi makanan yang lebih baik dan pakaian serta perasaan yang aman.

Tetapi kenyataannya justru sebaliknya, keadaan negara menjadi semakin parah karena pemerintah bertindak sangat kejam pada rakyatnya dan menindas hak-hak asasi manusia, dengan tidak memperhatikan dasar-dasar perikemanusiaan termasuk masalah melenyapkan agama yang berkembang dalam masyarakat adanya usaha meyakinkan rakyat bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Kamboja agar mau menuruti kehendak pemerintah.

---

<sup>73</sup> Sidney Scanberg, *op.cit.*

Pemerintah Pol Pot melarang adanya agama dan kepercayaan lainnya berkembang di Kamboja, agar masyarakat komunis yang berorientasi pada kepentingan negara dapat tercapai. Disini pemerintah menggunakan sifat negara yang digunakan sebagai bentuk kedaulatan negara agar masyarakat dapat menaati segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sifat ini adalah sifat monopoli, negara memiliki kekuasaan untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, maka negara menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dengan tujuan masyarakat. Pemerintah Kamboja kemudian berusaha untuk menghapuskan agama yang menjadi agama mayoritas penduduk dan melarang agama lain berkembang dan hanya melegalkan ideologi komunis yang boleh berkembang di dalam masyarakat.

## 5. Memuji Perang.

Perang adalah angka kita yang terbaik, orang tidak perlu takut pada perang. Jika ada perang, akan ada yang mati, tetapi orang tidak perlu takut pada mati. Perang menenangkan manusia, perang menyumbang kepada kesadaran dan persatuan mereka, hal tersebut adalah anggapan Mao tentang perang.

Pendapat Mao mengenai perang itulah yang mempengaruhi pemerintahan Kamboja, karena sewaktu Kamboja bersitegang dengan Vietnam kemudian melakukan peperangan terhadap negara tersebut karena perang dianggap sesuatu yang terbaik untuk dilakukan, perang tersebut

dapat menciptakan suatu persatuan bagi suatu negara. Maka dengan adanya perang dengan Vietnam itu dapat memunculkan suatu perasaan yang senasib bagi seluruh rakyat Kamboja untuk dapat menghadapi musuh yang merupakan musuh bersama, sehingga rakyat dapat bersatu.

Untuk kepentingan perang itu, maka Pol Pot membentuk suatu angkatan perang. Pembentukan angkatan perang itu dilakukannya dengan menghubungi para pemimpin dan wakil daerah angkatan perang untuk segera ke Phnom Penh, tiga bulan setelah dilakukannya kudeta dari pemerintahan Lon Nol, di mana angkatan perang itu merupakan angkatan perang yang pertama bagi rakyat Komunis Kamboja. Pol Pot di dalam pertemuan itu berpidato bahwa dengan melakukan peperangan akan menggerakkan negeri itu ke dalam sebuah revolusi yang kedua. Angkatan perang yang dibentuk itu dipimpin oleh Pol Pot sendiri. Hasil dari organisasi ini adalah suatu angkatan perang pusat yang mengorganisir dua per tiga tentara yang ditepatkan di Phnom Penh, sisanya di tempatkan di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah pusat.<sup>74</sup>

Jadi terlihatlah bahwa usaha-usaha atau langkah yang diambil oleh pemerintahan Pol Pot itu sangatlah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Mao Zedong. Malahan ajaran Mao Zedong tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menentukan setiap kebijakan politik yang diambilnya.

Langkah-langkah atau usaha yang diambil oleh pemerintahan Pol Pot dalam membangun negara Kamboja yaitu melakukan pembersihan-pembersihan

---

<sup>74</sup> Elizabeth Becker, *op.cit.*, hal. 188.

atau hukuman mati bagi lawan-lawan politiknya, melaksanakan pembunuhan secara masal, menciptakan suatu masyarakat tanpa uang tetapi dengan kerja paksa, penghapusan kota-kota, menghapuskan atau memusnahkan agama dan yang terakhir yaitu memuji perang. Usaha-usaha yang dilakukan itu terlihat sangat tidak manusiawi, karena justru membuat rakyat Kamboja menjadi sengsara, malahan tidak sedikit rakyat yang kehilangan nyawanya.

Usaha-usaha tersebut diambil karena pemerintahan Pol Pot ingin membentuk suatu masyarakat Kamboja yang baru. Dimana masyarakat yang tercipta merupakan suatu masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan ajaran Mao. Masyarakat yang diinginkan merupakan masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas dan terdiri dari generasi muda dan juga merupakan masyarakat komune yang tinggal di daerah-daerah pedesaan bukan di kota-kota besar dengan meniadakan sistem upah atau gaji bagi mereka yang bekerja, karena pemerintah menggantinya dengan membagikan makanan dan pakaian. Dengan begitu antara masyarakat kota dengan masyarakat desa sudah tidak ada perbedaan kelas maupun perbedaan sosial lainnya, karena mereka telah berada pada lingkup yang sama dan dengan kedudukan yang sama pula. Hal ini sesuai dengan teori mengenai komunis yang dikeluarkan oleh Karl Marx dengan ajarannya Marxisme, yaitu masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang tanpa kelas sehingga tidak ada lagi perbedaan sosial dalam masyarakat yang memicu munculnya konflik sosial, untuk mewujudkan cita-cita itu, maka faktor industri yang ada di dalam negara sepenuhnya dikuasai oleh negara.

Hal tersebut disesuaikan juga oleh ideologi yang dianut oleh Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot, yaitu berdasarkan ideologi komunis. Tetapi ide komunis yang dianut oleh Kamboja merupakan ideologi komunis Cina dibawah pengaruh Mao Zedong. Dimana komunis Cina itu menitik beratkan revolusi yang terjadi pada kaum tani, bukan pada kaum buruh pabrik, seperti yang terjadi pada negara komunis yang ada di Eropa khususnya Rusia.

Masyarakat petani menjadi sektor utama dalam ideologi komunis Cina maupun Kamboja, karena sebagian masyarakat yang terdapat dalam negara itu adalah petani. Sehingga pada prakteknya negara tersebut menjadikan semua masyarakatnya petani semua. Disamping itu juga terdapat keuntungannya menjadikan penduduknya sebagai masyarakat petani, karena mereka nantinya dapat menyediakan bahan-bahan makanan lainnya untuk keperluan revolusi dan juga penduduk desa tersebut dan juga penduduk desa tersebut dapat dijadikan sebagai tentara revolusi apabila dibutuhkan.

Pol Pot melakukan langkah-langkah tersebut didalam pemerintahannya dikarenakan beberapa hal, yaitu, pertama Pol Pot berobsesi menjadikan negara Kamboja berdasarkan ajaran-ajaran Mao Zedong yang mengembangkan paham komunis yang gerakannya diorientasikan pada kaum petani.

Kedua, Pol Pot menginginkan bentuk negara yang diktaktor, di mana ia yang menjadi penguasa tertinggi sehingga Pol Pot bertindak sangat kejam kepada siapapun yang melawannya, hal itu ia lakukan demi tercapainya tujuan negara yaitu membentuk suatu negara komunis berdasarkan ajaran-ajaran Mao, yaitu, peranan desa lebih penting, sehingga Pol Pot menggiring penduduk yang ada di

kota-kota besar pindah menuju ke pedalaman untuk menjadi masyarakat petani. Ajaran lainnya yaitu kekuatan tentara yang dianggap lebih penting dalam hal ini adalah tentara Khmer Merah. Semangat revolusi lebih penting dari pada keahlian teknis. Kekuatan subyektif lebih penting dari pada kenyataan obyektif, yang dilakukannya dengan menyebarkan cerita kepada kaum muda bahwa pemerintahannya lebih baik dari pada pemerintahannya sebelumnya.

Demikianlah Pol Pot kemudian melaksanakan langkah-langkah tersebut dikarenakan ia ingin menjadikan negaranya seperti apa yang telah diajarkan oleh Mao dengan ajaran-ajarannya maupun pendapatnya mengenai suatu negara komunis, yaitu gerakannya berbasis pada kekuatan petani, sehingga revolusinya dimulai dari desa-desa bukan kota, selain itu jumlah petani yang sangat besar dapat dijadikan sebagai anggota kaum revolusioner dan mereka sanggup menyediakan bahan makanan dan bahan mentah lainnya untuk keperluan revolusi yang sedang berlangsung.

Pemerintahan di Kamboja dengan begitu merupakan pemerintahan diktator atau pemerintahan yang berbentuk tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada satu orang, tetapi tetap berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan (kepentingan) dirinya sendiri serta tidak mengindahkan kesejahteraan rakyat (umum). Pemerintahan dipegang oleh seorang tiran secara sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Penguasa yaitu raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat.

## BAB IV

### AKHIR PEMERINTAHAN POL POT DI KAMBOJA

#### A. Sifat Pemerintahan Pol Pot

Setelah Pol Pot berhasil berkuasa di bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Keadaan negara Kamboja setelah Pol Pot berkuasa ternyata tidak membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakatnya, melainkan malah menambah kacaunya keadaan negara tersebut. Karena Pol Pot menjalankan pemerintahannya secara diktatur oleh sebab itu masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap setiap kebijakan yang di keluarkan, apabila di langgar hukuman yang dijatuhkan tidak tanggung-tanggung yaitu hukuman mati.

Kehidupan politik yang dijalankan merupakan suatu bentuk politik yang sewenang-wenang terhadap masyarakat maupun terhadap teman-teman politiknya. Karena Pol Pot menggunakan suatu pemerintahan yang bersifat diktator. Orang-orang yang dianggap menghalangi jalannya pemerintahan itu disingkirkan dengan cara dibunuh dan disiksa secara kejam dan tidak berprikemanusiaan.

Langkah ataupun kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Pol Pot dalam pemerintahannya itu ternyata telah membuat masyarakat Kamboja hidup didalam kesngsaraan. Karena kebijakan atau langkah-langkah yang diambil tersebut tidak dengan memperhatikan keadaan rakyat nantinya, oleh sebab itu banyak rakyat yang menjadi korbannya.

Pol Pot di dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Mao Zedong. Hal ini dikarenakan Pol Pot beserta kawan-kawannya merupakan seorang pendukung setia ajaran Mao Zedong, bahkan mereka ini menjalankan prinsip-prinsip ajaran Mao dengan baik dan tekun demi tercapainya cita-cita Mao, yaitu masyarakat komunis. Tetapi di dalam prakteknya rejim Pol Pot ini sangat kejam dalam pemerintahannya. Sehingga terlihat bahwa rejim Pol Pot merupakan suatu rejim pemerintahan yang tidak memperhatikan dasar-dasar dan prinsip kemanusiaan. Karena telah mengakibatkan berjuta-juta orang telah kehilangan nyawanya, demi tercapainya suatu cita-cita yang berdasarkan ajaran Mao. Dengan begitu terlihatlah pemerintahan yang dibangun oleh Pol Pot tersebut telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan pada pemerintahan Pol Pot yang begitu kejam, maka muncullah berbagai reaksi yang melakukan penentangan maupun perlawanan terhadap pemerintah. Reaksi-reaksi yang muncul tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga berasal dari luar negeri. Mereka sangat prihatin melihat keadaan Kamboja yang begitu kacau sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pemerintahan Pol Pot.

## **B. Reaksi Yang Berasal Dari Luar Negeri.**

Setelah Pol Pot menguasai Kamboja kemudian menjalankan suatu pemerintahan yang kejam dan tidak manusiawi. Karena selama Pol Pot berkuasa telah membunuh sekitar tiga juta orang. Kebijakan-kebijakan atau

langkah yang diambil oleh pemerintahan Pol Pot mendapat banyak kecaman dari negara-negara lain yang menilai bahwa Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot tersebut telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Reaksi yang muncul tersebut antara lain datang dari Amèrika Serikat, dengan presidennya pada waktu adalah Carter dan juga reaksi datang dari pemerintahan Inggris.<sup>75</sup> Kedua negara tersebut melakukan kecaman-kecaman dan kutukan terhadap pemerintahan Kamboja yang berada dibawah rejim Pol Pot. Di mana pemerintahan itu telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang paling buruk yang terjadi pada saat itu.

Reaksi terhadap pemerintahan Pol Pot yang diktaktor dan kejam terlebih lagi datang dari negara-negara tetangga dekatnya, terutama dari Vietnam. Vietnam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Pol Pot, karena pemerintahan ini terlibat permasalahan di perbatasan yang menyebabkan kedua negara itu berkonfrontasi, dan akhirnya terjadi peperangan. Di mana Vietnam memberikan dukungannya terhadap Heng Samrin. Heng Samrin sendiri mendukung Vietnam dari pada pemerintahan Pol Pot, oleh sebab itu Vietnam kemudian melakukan invasi terhadap Kamboja pada akhir tahun 1978 sampai awal tahun 1979. Serangan yang dilancarkan oleh Vietnam tersebut merupakan suatu serangan yang besar-besaran dengan menurunkan pasukan regulernya dan menggunakan berbagai kendaraan tempur untuk menjatuhkan rezim tersebut. Sampai pada akhirnya tanggal 7 Januari 1979

---

<sup>75</sup> *Merdeka*, 14/15 Mei 1979.

pemerintahan Pol Pot berhasil digulingkan kemudian Heng Samrin menduduki jabatannya sebagai Presiden Kamboja.

Hubungan antara Demokratik Kamboja dan Vietnam tidak pernah baik, dengan melihat latar belakang itu terlihat bahwa peperangan yang terjadi tiba-tiba antara kedua negara itu tahun 1977 sampai 1978 tidak dapat dianggap enteng. Rejim Pol Pot memilih untuk bersikap anti Vietnam, kebijakan ini telah lekat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya, dimana di ikuti juga oleh Lon Nol dan Sihanouk dalam tahun 1950an dan 1960an. Pol Pot memilih untuk melanjutkan kebijakan ini dengan berbagai pertimbangan, termasuk persekutuannya dengan Cina yang juga bersikap anti Vietnam. Tetapi penyebab pemimpin Demokratik Kamboja tidak mau untuk melakukan “hubungan yang khusus” atau melakukan kerjasama bilateral, dikarenakan takut bahwa orang-orang Vietnam yang berada di bawah pengaruh Partai Komunis Vietnam akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di Kamboja. Terlebih lagi ideologi Demokratik Kamboja nasionalistis yang sifatnya keras. Pertikaian muncul dengan Vietnam tentang kepemilikan Pulau Pantai sejak tahun 1975. tahun 1976-1977, konflik antara kedua negara menjadi semakin parah, dengan adanya invasi Vietnam terhadap Kamboja pada tahun 1978 sampai 1979 dan ditandai dengan runtuhnya rejim Pol Pot.<sup>76</sup>

Menurut Sydney Scanberg mengatakan bahwa Kamboja telah menjadi suatu paradigma dari kelemahan hukum yang berhubungan dengan kejahatan

tanpa adanya tindak lanjut dari dunia internasional khususnya dari PBB. Hubungan internasional, bagaimanapun legitimasinya tergantung pada keinginan bangsa yang terdapat di dunia ini untuk dapat mematuhi dan memperkuatnya. Dalam kasus Kamboja, banyak negara menyatakan rasa terkejut dan kengerian, tanpa melakukan apapun. Bahkan setelah angkatan bersenjata Vietnam mendepak Khmer Merah pada tahun 1979, Vietnam pun disambut sebagai penyelamat dan memasang pemerintahan yang pro Hanoi di Pnom Penh. Bangsa-bangsa Barat melihat kursi Kamboja di PBB terpakai selama beberapa tahun oleh wakil-wakil yang sama dengan masa Khmer Merah. Washington dan sekutunya mencela kejahatan Khmer Merah namun tetap saja berupaya untuk kepentingan ideologi perang dingin, mereka memutuskan untuk lebih baik membiarkan Khmer Merah memiliki kursi di PBB dari pada mengalihkannya pada pemerintahannya yang sekarang yaitu pada Vietnam yang berada dibawah pengaruh Uni Soviet. Dapat terlihat bahwa politik sebenarnya bukan hukum tetapi pengaturan kekuatan.<sup>77</sup>

### **C. Reaksi Yang Berasal Dari Dalam Negeri.**

Di dalam negeri Kamboja, dimana Pol Pot berkuasa dengan menjalankan pemerintahannya menggunakan prinsip-prinsip ajaran Mao yang ternyata membawa rakyat ke dalam kesengsaraan karena pemerintahan yang ada begitu kejam. masyarakat yang ada di Kamboja telah dipaksa pindah dari kota-kota ke desa-desa dan keluarga-keluarga dipecah-pecah tanpa mengenal

---

<sup>77</sup> Sydney Scanberg, *op.cit*

perikemanusiaan.<sup>78</sup> Tentu saja hal ini mengakibatkan keadaan yang kacau dan tidak teratur serta masyarakat diliputi perasaan yang tidak aman.

Pelaksanaan kebijakan yang mengeluarkan sebuah peraturan dengan menghapuskan sistem uang dan gaji, melainkan dengan pemberian makanan dan pakaian kepada masyarakat yang dipaksa untuk bekerja demi kepentingan pemerintah pada waktu itu. Terlebih lagi kebijakannya dalam melakukan politik pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya yang dinilai berani menentang pemerintah. Selain itu juga dilakukannya pembunuhan massal, maka hal ini menyebabkan rakyat Kamboja banyak yang mati atau pun melarikan diri dari Kamboja menuju ke daerah-daerah yang dinilai bebas dari gangguan pemerintahan Pol Pot.

Dengan adanya rejim pemerintahan Pol Pot yang bersifat kejam dan tidak mengenal rasa kemanusiaan terhadap rakyat maupun orang-orang yang penting dalam pemerintahan, maka hal ini menyebabkan rakyat menjadi tidak tahan terhadap pemerintahan yang ada. Pada akhirnya memunculkan suatu reaksi yang berasal dari rakyat untuk mengakhiri pemerintahan yang kejam itu.

Bentuk-bentuk dari reaksi itu berupa suatu pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan rejim pemerintahan yang sedang berlangsung. Pemberontakan yang dilakukan itu ternyata mendapat bantuan dari negara tetangga yaitu Vietnam. Karena Vietnam juga mempunyai kepentingan yang sama yaitu menjatuhkan pemerintahan Pol Pot.

---

<sup>78</sup> *Kompas*, 12 April 1980.

Vietnam mau mendukung dan memberikan bantuan terhadap kaum pemberontak di Kamboja dikarenakan Vietnam tersebut pada masa Pol Pot berkuasa di depak dari Kamboja. Dalam hal ini Kamboja tidak mau melakukan hubungan kerja sama dengan Vietnam. Dimana Vietnam Utara pada waktu itu telah berhasil menguasai Vietnam Selatan. Kamboja tidak mau melakukan kerjasama dengan Vietnam karena Kamboja sendiri lebih condong ke Cina dalam hal kebijakan politiknya. Vietnam pada waktu itu dipengaruhi oleh ideologi komunis Rusia, oleh sebab itu Kamboja mengusir Vietnam dan Rusia yang telah membantunya dalam melakukan kudeta dari pemerintahan Lon Nol, dan Kamboja hanya merangkul Cina pada waktu itu dari negara-negara komunis yang telah membantunya itu.

Bukan hal itu saja yang menyebabkan terjadinya konfrontasi antara Kamboja dan Vietnam. Kedua negara tersebut berselisih juga di daerah perbatasan. Pertempuran yang terjadi ternyata tidak hanya di daerah perbatasan tetapi menjadi semakin meluas ke wilayah-wilayah yang ada di kedua negara. Sehingga konflik perbatasan telah meningkat menjadi suatu tahap perang, dimana Kamboja terus menerus melakukan penyerangan terhadap Vietnam.

Keadaan yang seperti itulah yang telah membuat Vietnam membantu perlawanan rakyat Kamboja menghadapi pemerintahan yang kejam. Siaran radio Hanoi hari Senin mengatakan bahwa kaum pemberontak telah menduduki jalan-jalan di propinsi Rattanakiri dan Slung Treng di bagian timur laut Kamboja. Sehingga memutuskan jalur perbekalan ke ibu kota. Mereka

juga telah menyerang kota-kota Kratie dan Kompong Thom di bagian timur laut dan tengah negeri itu.<sup>79</sup>

Aksi yang dilakukan oleh rakyat Kamboja semakin meluas, mereka memberontak dan merampas menara pengawas lapangan terbang di kota Kompong Chanang. Aksi tersebut dilakukan oleh serdadu-serdadu pemerintah. Dengan berhasilnya pemberontakan dan perampasan itu, maka mereka dapat mengkoordinasikan satuan-satuan yang lainnya yang ada di Kamboja.

Selain melakukan aksi tersebut rakyat Kamboja yang memberontak itu melakukan aksi balas dendam dengan menembak perwira-perwira komandan mereka dan menghukum banyak serdadu yang kejam dan bertindak sewenang-wenang selama tiga tahun itu.<sup>80</sup>

Pertemuan dan demonstrasi banyak dilakukan oleh para pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan yang terdapat pada waktu itu. Pertemuan dan demonstrasi itu juga banyak dilakukan di perkebunan-perkebunan negara dan pabrik-pabrik. Di samping itu juga menyebarkan selebaran-selebaran yang dibagikan di berbagai tempat di negeri itu, yang isinya menyerukan kepada rakyat Kamboja agar bangkit dan mau melawan untuk melakukan penggulingan terhadap rezim pemerintahan Pol Pot.

Pemberontakan yang dilakukan itu ternyata semakin meluas merembet ke berbagai daerah dan instansi di dalam negara Kamboja. Melihat keadaan

---

<sup>79</sup> *Kompas*, 25 Oktober 1978.

<sup>80</sup> *Ibid.*

yang gawat tersebut, maka pemerintah pusat mengadakan pembersihan secara besar-besaran di kalangan militer, Partai Komunis dan juga kalangan organisasi pemuda dan rakyat.<sup>81</sup>

Di dalam menghadapi pemerintahan Pol Pot ini, maka rakyat Kamboja kemudian membentuk usaha-usaha untuk menyingkirkan pemerintahan itu. Usaha tersebut yaitu membentuk suatu Front Persatuan Nasional Penyelamat Kamboja. Front tersebut dibentuk dari Vietnam yang memberikan suatu tempat untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Pol Pot yang sedang berkuasa. Front ini diumumkan pada tanggal 3 Desember 1978 dengan nama Front Persatuan Nasional Untuk Keselamatan Kamboja (KNUFS). Di dalam front tersebut memilih Heng Samrin sebagai pemimpin.

Front yang dibentuk oleh Vietnam dengan pemimpinnya Heng Samrin mengeluarkan suatu deklarasi yang isinya yaitu:

- a. Jika Kamboja sudah berdiri suatu pemerintahan yang baru maka Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk Pol Pot akan bubar dengan sendirinya. Untuk selanjutnya akan dibentuk DPR yang baru setelah diselenggarakan pemilu nasional.
- b. Akan dibuat suatu perundang-undangan baru yang menjamin hak-hak rakyat bagi persamaan dan kemerdekaan serta demokrasi dan merdeka.
- c. Setiap warga negara Kamboja mempunyai hak bebas tinggal di lingkungan negara, bebas untuk memilih dan dipilih, bebas berbicara, berkumpul dan semua hak dijamin bebas.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*



- d. Setiap suku bangsa sekalipun yang terkecil mempunyai hak dan tugas yang sama seperti penduduk yang lainnya.
- e. Pemerintah yang baru nanti akan mengatur suatu politik ekonomi bebas yang ditujukan untuk kemajuan sosialisme, pembangunan dibidang ekonomi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pembangunan pertanian dan industri.<sup>82</sup>

Pemerintahan Pol Pot mengetahui bahwa pemberontakan yang terjadi mendapat bantuan dari Vietnam. Untuk mengatasinya pemerintah Kamboja telah merencanakan suatu serbuan terhadap Vietnam. Mereka kemudian terlibat peperangan yang sengit di daerah Propinsi Rattanakiri dan juga di daerah perbatasan.

Tindakan Vietnam selanjutnya untuk menghadapi Kamboja, yaitu mendukung Heng Samrin dalam melakukan pemberontakan. Vietnam melihat terdapatnya suatu perpecahan di dalam tubuh Partai Komunis Kamboja. Dimana salah satu anggota komite sentralnya yang memegang posisi Wakil Kepala Staf Wilayah Militer Kamboja Timur, Heng Samrin bersimpati dan lebih memihak pada Vietnam.

Heng Samrin bukanlah orang baru bagi gerilya Vietcong, mereka sudah 19 tahun bahu membahu di ujung jalur "Ho Chi Minh". Dimana jalur tersebut digunakan selama bertahun-tahun untuk mengalirkan senjata dan pasukan dari Vietnam Utara. Jalur ini merembes melalui perbatasan Laos dan kemudian berujung di perbatasan Kamboja dan Vietnam. Jalur ini juga yang menjadi

---

<sup>82</sup> *Merdeka*, 26 Desember 1978.

alasan kuat untuk menggulingkan Norodom Sihanouk, karena ada alasan dia telah memberikan sebagian tanah Kamboja sebagai basis gerilya Vietcong yang menghantam Vietnam Selatan dan Amerika Serikat dari Saigon.<sup>83</sup>

Adanya hubungan yang dekat antara Heng Samrin dan Vietnam membuat Vietnam kemudian mendukung Heng Samrin dalam pemerintahan Kamboja. Hal ini didasarkan pada kepentingan yang sama menjatuhkan pemerintahan Pol Pot. Karena Heng Samrin pun merasa tidak puas terhadap pemerintahan Pot Pot.

Pada akhir bulan Desember 1978 dan minggu pertama Januari 1979, Vietnam akhirnya mengerahkan 100 000 pasukan regulernya. Dimana pasukan itu didukung juga oleh pesawat-pesawat pembom dan pemburu, serta ratusan tank yang menerobos perbatasan Kamboja. Di arena pertempuran tersebut, Vietnam juga memanfaatkan senjata-senjata Amerika yang didapat melalui rampasan perang yang digunakan untuk menyerang Pol Pot.<sup>84</sup>

Serangan-serangan yang spektakuler ini dapat berjalan lancar karena dari dalam Kamboja sendiri sudah ada kerjasama yang dilakukan dengan divisi Heng Samrin. Sehingga pada tanggal 7 Januari 1979 istana Phnom Penh sebagai lambang dari kekuasaan itu berhasil dikuasai.<sup>85</sup> Akhirnya Pol Pot bersama-sama dengan rezimnya dapat dijatuhkan, karena dalam serangan yang

---

<sup>83</sup> Sinar Harapan, 14 Juni 1979.

<sup>84</sup> <sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Elizabeth Becker, *op.cit.*, hal. 436.

dilancarkan itu Pol Pot melarikan diri. Jadilah Heng Samrin yang menduduki istana dengan predikat sebagai Presiden Kamboja.

Pemerintahan yang dijalankan oleh Pol Pot sangatlah kejam karena menggunakan bentuk pemerintahan yang diktatur, di mana ia berkuasa sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan yang dijalankan di negara itu. Langkah-langkah yang diambil dalam pemerintahannya itu telah membawa rakyat ke dalam kesengsaraan dan kehilangan nyawa, semua itu demi terwujudnya cita-citanya membangun negaranya yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran Mao, tetapi pada prakteknya ia telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Oleh sebab itu pemerintahan Pol Pot mendapatkan banyak reaksi yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri. Reaksi dari luar dilakukan oleh negara Amerika Serikat dan Inggris yang mengecam dan mengutuk tindakan pemerintahan Kamboja dibawah kekuasaan Pol Pot karna telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang paling buruk terjadi pada waktu itu di dunia. Selain itu juga muncul reaksi dari negara-negara tetangga, terutama dari negara Vietnam yang melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Kamboja yang dipicu oleh masalah perbatasan, sehingga ia mendukung Heng Samrin, yang juga terlibat perseteruan dengan Pol Pot dan kemudian memihak Vietnam. Perseteruan antara Kamboja dan Vietnam semakin memanas pada akhirnya Vietnam melakukan invasi kepada Kamboja yang di lancarkannya pada akhir taun 1978 sampai awal tahun 1979. vietnam melakukan serangan besar-besaran untuk menjatuhkan rejim Pol Pot dengan menurunkan pasukan perang regulernya dan menggunakan kendaraan tempur yang sangat lengkap.

Menurut Sydney Scanberg Kamboja telah menjadi suatu pandangan atau paradigma bagi dunia internasional yang berkaitan dengan kelemahan hukum, di mana terdapat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa negara tanpa adanya tindak lanjut dari PBB sebagai suatu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan di suatu negara.

Reaksi yang berasal dari dalam negeri berupa pemberontakan yang tujuannya mengakhiri rejim tersebut. Pemberontakan yang dilakukan ternyata dibantu oleh Vietnam yang juga menginginkan tumbangny pemerintah Pol Pot, karena antara Kamboja dan Vietnam terlibat konfrontasi. Pemberontakan oleh rakyat Kamboja telah menyebar sampai ke daerah-daerah dan juga ke instansi di dalam negeri Kamboja sendiri. Rakyat pun kemudian membentuk Front Persatuan Nasional Penyelamat Kamboja yang dibentuk oleh Vietnam dan dipimpin oleh Heng Samrin. Setelah Vietnam berhasil menginvasi Kamboja dengan melakukan penyerangan yang sangat besar sehingga membuat pemerintahan Pol Pot menjadi kacau dan akhirnya memaksa Pol Pot untuk menyerah terhadap Vietnam dan akhirnya melarikan diri. Heng Samrin pun segera duduk di kursi pemerintahan Kamboja dengan dukungan Vietnam.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Pol Pot merupakan seorang pemimpin Kamboja yang memperoleh kursi pemerintahan dengan jalan merebut kekuasaan atau dengan cara kudeta yang diperolehnya dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Lon Nol. Dimana pemerintahan Lon Nol juga dapat berkuasa di Kamboja melalui cara kudeta dari kepemimpinan Sihanouk. Karena Sihanouk mengeluarkan suatu kebijakan politik untuk mendukung Vietnam Utara dalam melakukan peperangan dengan Vietnam Selatan, yang menyebabkan rakyat Kamboja menjadi khawatir bahwa Kamboja juga akan ikut terlibat dalam perang antara kedua negara tersebut. Oleh sebab itu Amerika Serikat mendukung Lon Nol untuk melakukan kudeta sewaktu Sihanouk tidak berada di Kamboja.

Sewaktu Lon Nol berkuasa di Kamboja, ternyata kepemimpinannya mendapatkan banyak tekanan yang berasal dari lawan-lawan politiknya, terutama dari Partai Komunis dan Khmer Merah dibawah pimpinan Khieu Sampan bersama-sama dengan Pol Pot dan Ieng Sary. Mereka melakukan pellawanan-perlawanan terhadap pemerintahan Lon Nol karena pemerintahan ini didukung oleh Amerika Serikat yang berpaham liberalis kapitalis. Disamping itu juga pada pemerintahan Lon Nol banyak melakukan tekanan-tekanan terhadap orang-orang Vietnam utara yang jumlahnya minoritas di Kamboja.

Pemerintahan Lon Nol itu akhirnya terus mendapatkan tekanan atau rong-rongan dan juga perlawanan yang dilakukan berasal dari lawan-lawan politiknya yaitu dari Khmer Merah yang beranggotakan Khieu Sampan, Pol Pot dan Ieng Sary. Perlawanan yang dilakukan itu mendapat dukungan dari negara-negara komunis yang sangat berpengaruh di dunia ini, seperti Uni Soviet, RRC, dan Vietnam Utara. Negara-negara komunis tersebut memberikan bantuan terhadap Khmer Merah dalam bentuk persenjataan dan amunisi serta kendaraan perang dalam jumlah yang besar untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Lon Nol. Akhirnya Khmer Merah pun melakukan suatu serangan yang dilancarkan secara besar-besaran dengan dukungan dari negara komunis. Pada akhirnya pemerintahan Lon Nol dapat digulingkan dari pemerintahan Kamboja an digantikan oleh pemerintahan Pol Pot.

Pol Pot dapat menjadi orang yang berpengaruh dalam pemerintahan Kamboja setelah Lon Nol berhasil digulingkan oleh Khmer Merah. Karena Pol Pot tersebut berhasil mendominasi Khmer Merah bersama Khieu Sampan dan Ieng sary, tetapi yang duduk sebagai orang yang berkuasa di Kamboja yaitu Pol Pot, karena menjabat sebagai Perdana Menteri dimana Ieng Sary sebagai Wakilnya, sedangkan Khieu Sampan menjabat sebagai Presiden Demokratik Kamboja, tetapi jabatan tersebut hanya sebagai simbol saja, karena semua kebijakan politik diatur oleh Pol Pot.

Pol Pot bersama dengan teman-teman politiknya kemudian merancang susunan pemerintahan, dimana di dalamnya berisikan teman-

teman dekat dan keluarga sendiri yang menjabat sebagai menteri dan kepala badan-badan pemerintahan.

Setelah Pol Pot duduk di kursi pemerintahan, ia pun menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan ajaran-ajaran atau pandangan Mao Zedong. Karena Pol Pot beserta teman-temannya merupakan pengikut Mao yang setia. Ajaran Mao dijadikan sebagai suatu dasar atau landasan dalam mewujudkan terbentuknya suatu masyarakat komunis.

Sewaktu Pol Pot berkuasa, ia menyingkirkan negara-negara komunis yang tadinya membantu dalam melakukan kudeta terhadap pemerintahan Lon Nol. Negara-negara komunis tersebut didepak atau diusir dari Kamboja, tetapi Kamboja merangkul RRC dan hanya mau melakukan kerja sama dengan RRC, oleh sebab itu Kamboja menjadi sangat dipengaruhi oleh RRC.

Selama menjalankan pemerintahan di Kamboja, maka politik Kamboja di bawah Pol Pot berorientasikan pada RRC terutama dengan pandangan-pandangan Mao Zedong. Oleh sebab itu langkah-langkah maupun usaha yang diambil oleh Pol Pot semuanya berorientasi pada pandangan Mao. Adapun usaha-usaha atau langkah yang diambil oleh Pol Pot beserta kawan-kawannya dalam mempertahankan pemerintahannya yaitu; mengadakan politik pembersihan bagi lawan-lawan politiknya yang dianggap berani melakukan perlawanan atau maupun memberikan suatu pendapat yang berbeda serta bagi orang yang membahayakan kehidupan politik pemerintah ataupun mereka yang dianggap penyeleweng negara.

Langkah yang kedua, dilakukannya pembunuhan secara massal. Pembunuhan itu ditujukan bagi rakyat Kamboja yang tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, juga bagi orang-orang yang telah berusia diatas 50 tahun. Hal ini dilaksanakan karena pemerintah menginginkan jumlah penduduk Kamboja yang hanya berjumlah satu setengah juta jiwa saja. Dimana isinya hanya golongan muda saja. Agar masyarakat baru Kamboja dapat dibentuk menjadi suatu masyarakat komunis berdasarkan cita-cita Mao.

Langkah yang ketiga, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang tanpa uang tetapi dengan kerja paksa. Pemerintah disini berusaha untuk menggantikan sistem upah atau gaji dengan pembukaan kantin bebas atau pemberian makanan dan pakaian, karena uang dianggap sebagai sumber kejahatan. Sedangkan uang yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja digunakan untuk kepentingan negara lainnya, seperti pembiayaan perang dan pembangunan. Rakyat disuruh untuk kerja paksa yang dilakukan tanpa henti dengan jam istirahat yang sedikit. Demi tercapainya tujuan itu, maka pemerintah berusaha menghapuskan keluarga-keluarga dengan mengambil anak-anak mereka dan suami istri dipekerjakan secara terpisah.

Langkah keempat, yaitu menghapuskan kota-kota. Masyarakat yang ada di kota dipaksa untuk pindah ke desa-desa. Karena apabila masyarakat tetap berada di kota-kota besar maka akan mengakibatkan suatu masyarakat yang bersifat kapitalis, dimana sektor-sektor industri, lama-lama akan dikuasai oleh individu maupun pihak swasta, sehingga masyarakat

komunis yang sosialis tidak akan terbentuk. Desa lah tempat yang paling baik untuk mengembangkan ideologi komunis sebab disana terdapat masyarakat petani yang setengah proletar. Petanilah yang dapat menyediakan bahan makanan untuk keperluan revolusi dan penduduknya dapat dapat dijadikan sebagai tentara apabila diperlukan. Dengan pindahnya penduduk kota ke desa, maka masyarakat yang tanpa kelas akan dapat terwujud.

Langkah kelima, yaitu menghapuskan agama. Kamboja sendiri pada waktu itu merupakan negara yang menganut ajaran agama Buddha. Sewaktu Pol Pot berkuasa agama Buddha dilarang, Bhiksu-Bhiksu banyak yang dibunuh. Pelenyapan agama tersebut bertujuan agar masyarakat hanya berorientasi terhadap kepentingan negara, oleh sebab itu agama tidak diperlukan.

Langkah yang terakhir yaitu memuji-muji perang. Dimana terdapat suatu anggapan bahwa perang merupakan hal terbaik yang mesti dilakukan. Sebab dengan peperangan akan menyumbangkan kesatuan bagi bangsa itu sendiri. Dengan perang rakyat dituntut untuk bersatu dalam menghadapi musuh. Kamboja pun merealisasikan langkah ini dengan melakukan peperangan dengan negara Vietnam.

Di dalam menjalankan usaha-usahanya tersebut, kamboja dibawah pemerintahan Pol Pot telah membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak yang menjadi korbannya. Selama Pol Pot berkuasa maka sekitar tiga juta orang yang telah menjadi korban dari kekejaman pemerintahan yang dijalankan.

Pemerintah Pol Pot memimpin negara dengan sangat kejam dan banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan hal tersebut telah banyak menimbulkan reaksi. Reaksi yang datang berasal dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri terutama datang dari negara-negara yang besar seperti Amerika Serikat dan Inggris yang melakukan kecaman-kecaman dan kutukan serta memberikan pendapatnya mengenai pemerintahan itu, bahwa pemerintahan tersebut telah melanggar hak-hak asasi yang paling buruk saat itu. Reaksi juga datang dari Vietnam, Vietnam ingin menjatuhkan pemerintahan Pol Pot karena antara kedua negara terlibat perang di perbatasan yang kemudian meluas menjadi peperangan dan pertempuran di berbagai daerah di kedua negara.

Reaksi yang berasal dari dalam negeri, muncul karena tidak tahan dengan pemerintahan yang berlangsung. Karena telah menyebabkan rakyat menjadi menderita. Reaksi yang dilakukan oleh rakyat Kamboja itu kemudian menjadi suatu gerakan pemberontakan. Gerakan-gerakan yang dilakukan tersebut menginginkan mundurnya pemerintahan itu. Aksi yang dilakukan pun sangat radikal, yaitu melakukan balas dendam dengan membunuh para tentara yang bersifat kejam, juga melakukan demonstrasi serta menyebarkan selebaran ke berbagai daerah yang isinya menginginkan suatu pergantian kekuasaan yang sedang berlangsung.

Di dalam melakukan aksinya, rakyat yang memberontak mendapat dukungan dari Vietnam, Vietnam pun membentuk suatu Front Penyelamat Kaamboja sebagai wadah dari aksi-aksi yang dilakukan demi tercapainya

tujuan tersebut. Dalam front itu ditunjuklah Heng Samrin sebagai presidennya. Heng Samrin merupakan orang yang sangat dekat dengan Vietnam dan juga orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Vietnam akhirnya melancarkan suatu serangan besar-besaran dengan menurunkan tentara regulernya yang dilengkapi dengan berbagai peralatan perang beserta dengan tank-tank dan pesawat tempur hasil rampasan perangnya terhadap Amerika Serikat. Dengan serbuan Vietnam terhadap Kamboja yang dilakukannya pada bulan Desember 1978 sampai Januari 1979, maka pada tanggal 7 Januari 1979, rezim Pol Pot yang berkuasa di Kamboja berhasil digulingkan. Heng Samrin pun duduk menggantikan Pol Pot dalam memerintah Kamboja yang menjabat sebagai presiden Kamboja.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan oleh penulis untuk bidang politik bahwa hendaknya setiap negara, apa pun paham yang digunakan untuk mempertahankan eksistensi negaranya tersebut haruslah memperhatikan hak-hak asasi manusia, dan aspirasi rakyat juga harus selalu di perhatikan agar tidak terjadi suatu negara dengan bentuk pemerintahan yang diktatur. Keinginan antara pemerintah dengan rakyatnya haruslah sejalan agar tercipta suasana politik yang harmonis di dalam suatu negara. Pemilihan kepala negara juga harus memperhatikan aspirasi rakyat, karena dengan cara kudeta akan sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan karena nantinya pasti akan

ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang di dapat dengan jalan kudeta itu.

Saran untuk bidang pendidikan, bahwa dalam mengajarkan pendidikan sejarah harus sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga siswa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terlepas dari unsure legitimasi dalam penggunaan sejarah, dengan kata lain bahwa sejarah harus diajarkan seobjektif mungkin kepada siswa. Untuk kurikulumnya harus di sesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, dan sebaiknya diperlukan suatu kurikulum yang memang benar-benar baku sehingga pergantian kurikulum tidak sering terjadi. Selainnya itu, pendidikan politik harus diajarkan pada siswa, sehingga para sisiwa mempunyai pengetahuan yang baik mengenai politik, hal ini memungkinkan menumbuhkan sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negaranya.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Teori Negara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Arifin Bey, *Dari Sun Yat Sen ke Mao Tse Tung*, Jakarta, Tinta Mas, 1953.
- Becker, Elizabeth, *When The War Was Over*
- Craig Etchson, *The Rise and Demise of Democratic Campuchea*, Colorado, West View Press, 1984.
- Chandler, David, *History of Cambodia*,
- Friedmenn LL, D. Whoseller, *Pengantar Ilmu Poltik Dunia*, Bandung 1961.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI, 1995
- Harry Kawilarang, *Dunia di Tengah Kemelut*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1975.
- Hulsebos, *Komunis, Pengaduan, Djandji atau Antjaman?*, Jakarta, Pembangunan Jakarta, 1955.
- Kansil, C S T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Knopf, Alfred. A, *Opinion and American Democracy*, New York, 1961
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995
- Laski, Harorld J, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1961.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1993
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung Sinar Baru.
- Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

William Ebenstein and Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta, Erlangga, 1987

*Kompas*, 17 April 1978.

*Kompas*, 25 Oktober 1978.

*Kompas*, 12 April 1980.

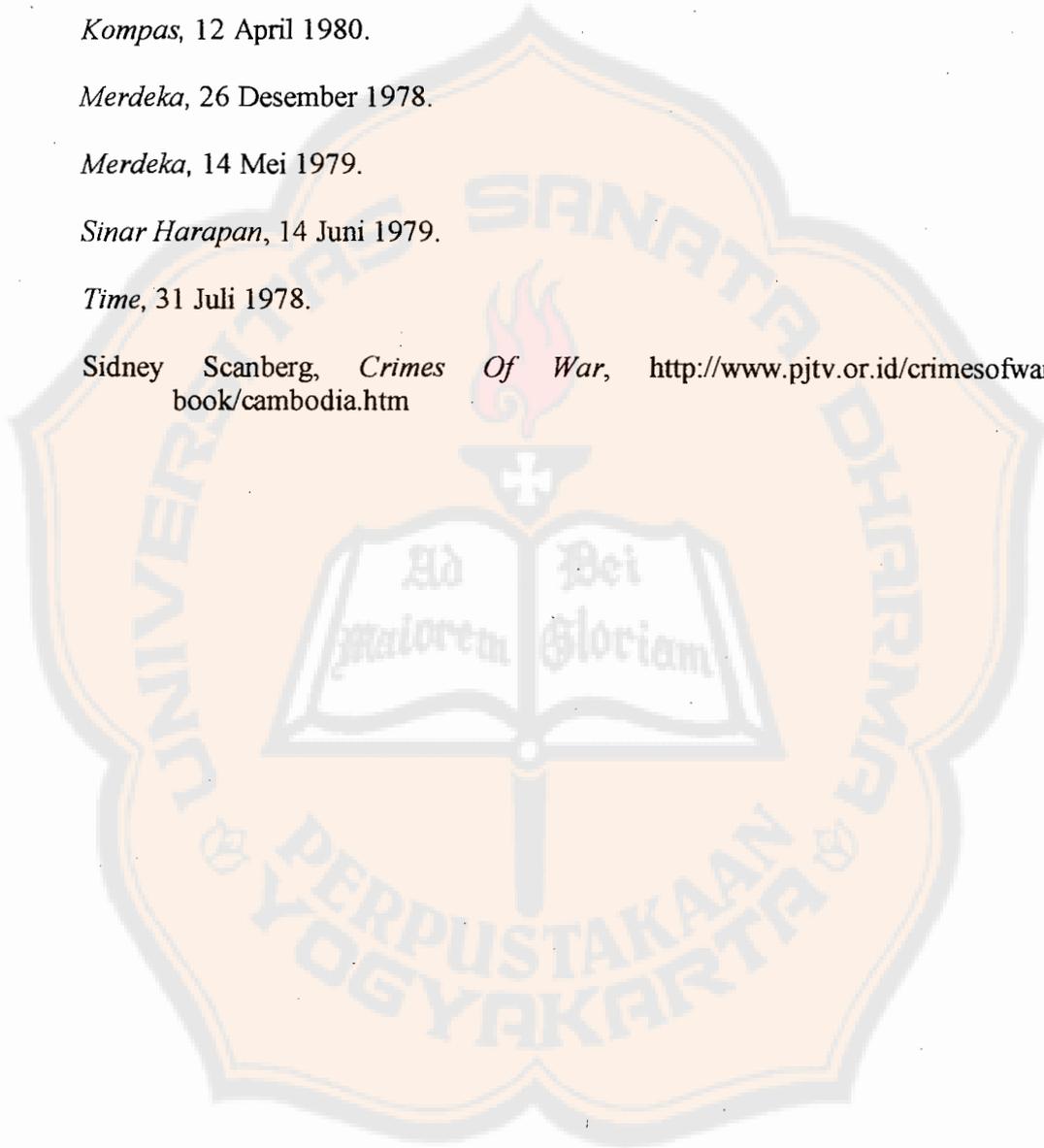
*Merdeka*, 26 Desember 1978.

*Merdeka*, 14 Mei 1979.

*Sinar Harapan*, 14 Juni 1979.

*Time*, 31 Juli 1978.

Sidney Scanberg, *Crimes Of War*, <http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/cambodia.htm>



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**LAMPIRAN**

**Silabus dan sistem Pengujian**

Sekolah : SMA

Kelas / Semester : XI / II

Alokasi Waktu : 90 Menit

Standar Kompetensi	Kemampuan memahami Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot.
Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis keadaan politik Kamboja semasa pemerintahan Pol Pot beserta kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mempertahankan eksistensi pemerintahannya
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa mampu mendeskripsikan proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan di Kamboja.</li> <li>2. Siswa dapat menganalisis usaha-usaha atau langkah-langkah yang diambil Pol Pot dalam menjalankan pemerintahan di Kamboja sehingga ia dapat menjadi orang yang paling berkuasa di negara itu.</li> <li>3. Siswa dapat mendeskripsikan akhir pemerintahan Pol Pot di Kamboja yang berhubungan dengan banyaknya reaksi yang muncul dari dalam dan luar negeri.</li> </ol>
Materi Pembelajaran	Kamboja Pada Masa Pemerintahan Pol Pot Tahun 1975-1979.
Uraian Materi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan di Kamboja. Sewaktu Lon Nol berkuasa di Kamboja di mana ia juga mendapatkan pemerintahan itu melalui kudeta dari pemerintahan Sihanouk, pemerintahan Lon Nol ternyata mendapatkan banyak tekanan yang berasal dari lawan-lawan politiknya yaitu Khmer Merah sebagai partai komunis Kamboja dibawah pimpinan Khieu Sampan bersains dengan Pol Pot dan Ieng Sary. Adanya perlawanan dari pihak Khmer Merah karena pemerinathan Lon Nol itu didukung</li> </ol>

oleh Amerika Serikat yang berpaham liberal kapitalis, selain itu pemerintah banyak melakukan tekanan terhadap orang-orang Vietnam Utara yang jumlahnya minoritas di Kamboja, Vietnam Utara merupakan salah satu negara komunis sehingga Khmer Merah mau membantunya.

Karena banyak mendapatkan tekanan dan rongrongan yang dilakukan terus menerus oleh pihak Khmer Merah dan dibantu oleh negara-negara komunis yang ada di dunia seperti Uni Soviet, RRC, dan Vietnam Utara. Bantuan itu berupa persenjataan, amunisi maupun kendaraan perang dalam jumlah yang tidak sedikit, tujuannya untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Lon Nol. Akibat serangan yang dilancarkan secara besar-besaran itu, maka pemerintahan Lon Nol akhirnya dapat digulingkan kemudian digantikan oleh Pol Pot yang duduk sebagai Perdana Menteri Kamboja.

Setelah Lon Nol dapat dijatuhkan, Pol Pot menjadi orang yang berkuasa karena ia berhasil mendominasi Khmer Merah bersama Khieu Sampan dan Ieng Sary. Pol Pot menjabat Perdana Menteri dan Ieng Sary sebagai wakilnya sedangkan Khieu Sampan sebagai Presiden Demokratik Kamboja, tetapi jabatan Presiden itu hanya sebagai simbol saja, karena setiap kebijakan politik dan peraturan yang berlaku di bawah perintah Pol Pot. Pemerintahan yang dibangunnya ternyata berisikan teman dekat dan kerabatnya. hal ini berarti bahwa system kolusi telah dijalankan.

Dalam menjalankan pemerintahannya itu, dasar-dasar yang digunakan sebagai pedoman adalah ajaran komunis yang telah dikembangkan oleh Mao Zedong, karena Pol Pot dan teman-teman politiknya merupakan pengikut dan pengagum ajaran-ajaran Mao.

Setelah berhasil duduk sebagai penguasa Kamboja, maka ia menyingkirkan negara-negara komunis yang telah membantunya dalam kudeta. Kamboja hanya mau bekerja sama hanya dengan RRC, yang menyebabkan besarnya pengaruh dari negara itu yang masuk ke Kamboja.

2. Usaha-usaha atau langkah yang diambil Pol Pot dalam menjalankan pemerintahan di Kamboja

Pemerintahan yang dijalankan oleh Pol Pot tersebut berorientasi pada RRC, terlebih pada ajaran Mao. Oleh sebab itu langkah-langkah yang diambil Pol Pot dalam pemerintahannya berorientasikan pada ajaran tersebut.

Kebijakan yang diambilnya untuk menunjang berhasilnya langkah-langkah tersebut yaitu melaksanakan pembersihan yang ditujukan terhadap orang-orang yang dianggap menyeleweng di alam pemerintahan Pol Pot baik itu yang berasal dari tubuh Khmer Merah sendiri maupun dari rakyat sipil. Melalui pembersihan itu diharapkan akan tercipta masyarakat yang teratur dan dapat menciptakan masyarakat yang dikehendaki yaitu masyarakat komunis tanpa adanya gangguan dari berbagai pihak.

Langkah-langkah yang diambilnya yaitu:

a. Melaksanakan Pembunuhan Secara Massal

Pol Pot mengadakan pengurangan penduduk Kamboja dengan membunuh rakyatnya yang tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, dan bagi orang yang telah berusia diatas 50 tahun. Pembunuhan ini dilaksanakan karena pemerintah hanya menginginkan jumlah penduduk Kamboja yang hanya berjumlah satu setengah juta jiwa saja, yang isinya generasi muda saja. Semuanya itu agar masyarakat baru Kamboja dapat dibentuk sesuai dengan cita-cita Mao yang membentuk

	<p>masyarakat komunis yang berisikan golongan muda dan dengan jumlah penduduk yang sedikit.</p> <p>b. Menciptakan Masyarakat Tanpa Uang Tetapi dengan Kerja Paksa.</p> <p>Pemerintah disini bertujuan ingin menggantikan system upah atau gaji dengan pembukaan kantin bebas atau pemberian makanan dan pakaian. Uang dianggap sebagai sumber kejahatan yang menyebabkan seseorang menjadi lupa diri dan menumbuhkan sikap yang kapitalis. Dengan begitu uang yang dihasilkan oleh para pekerja dapat digunakan untuk keperluan negara yang lain karena gaji mereka telah digantikan dengan pembagian makanan dan pakaian. Untuk keperluan itu masyarakat diharuskan bekerja paksa dengan jumlah waktu istirahat yang sedikit, mereka bekerja di lahan pertanian, pembuatan jalan, saluran air dan masih banyak lagi. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka pemerintah kemudian memisahkan keluarga-keluarga dengan mengambil anak-anak mereka dan suami istri dipekerjakan secara terpisah.</p> <p>c. Penghapusan Kota-Kota</p> <p>Masyarakat yang ada di kota-kota besar dipindah ke desa pedalaman. Hal itu dikarenakan apabila masyarakat masih tetap berada di kota akan berdampak pada sifat masyarakatnya yang akan berkembang kearah masyarakat kapitalis, di mana sektor-sektor industri lama-lama akan dikuasai oleh individu atau pihak swasta yang mengakibatkan masyarakat sosialis komunis yang berdasarkan cita-cita dan ajaran Mao tidak dapat terbentuk, karena masyarakat komunis menurut Mao harus berbasis pada petani di pedesaan. Masyarakat</p>
--	---

petani itu dibentuk dengan tujuan mereka dapat menyediakan bahan makanan untuk keperluan revolusi dan penduduknya dapat dijadikan sebagai tentara revolusi bila diperlukan.

d. Menghapuskan Agama

Kamboja merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tetapi setelah Pol Pot berkuasa, agama dilarang berkembang. Bhiksu-bhiksu banyak yang dibunuh selebihnya melarikan diri. Pelenyapan agama itu bertujuan agar masyarakat yang ada dapat berorientasi terhadap kepentingan negara, oleh sebab itu agama tidak diperlukan karena dapat menghambat jalannya pemerintahan.

e. Memuji Perang

Hal ini berdasarkan ajaran Mao yaitu perang adalah suatu hal yang terbaik yang mesti dilakukan. Karena dengan peperangan dapat menyumbangkan kesatuan bagi bangsaitu sendiri. Dengan perang rakyat dituntut untuk bersatudalam menghadapi musuh. Kamboja kemudian melaksanakannya dengan melakukan peperangan dengan Vietnam.

3. Akhir pemerintahan Pol Pot di Kamboja

Pemerintahan Pol Pot itu dilaksanakan dengan sangat kejam dan membuat rakyat sengsara dan menyebabkan sekitar tiga juta rakyat menjadi korban. Ini berarti bahwa pemerintahan yang telah dijalankan itu melanggar hak-hak asasi manusia dan hal tersebut telah mengundang banyak reaksi baik adri luar maupun dari dalam negeri.

a. Reaksi Dari Luar Negeri

Reksi dari luar negeri terutama dating dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris yang

	<p>kemudian melakukan kecaman terhadap Kamboja di bawah pemerintahan Pol Pot yang menganggap bahwa pemerintahan itu telah melanggar hak-hak asasi manusia yang paling buruk terjadi pada saat itu. Reaksi juga datang dari Vietnam, Vietnam lebih didasarkan karena adanya persetujuan mengenai daerah perbatasan disamping ingin juga menjatuhkan pemerintahan itu karena Vietnam tidak suka terhadap pemerintahan Pol Pot, yang kemudian meluas menjadi peperangan dan pertempuran di berbagai daerah.</p> <p>b. Reaksi dari Dalam Negeri</p> <p>Reaksi ini muncul karena rakyat tidak tahan akan penderitaan yang mereka alami karena pemerintahan itu sangat kejam terhadap rakyat. Reaksi itu berupa pemberontakan yang menginginkan jatuhnya pemerintahan itu. Aksi-aksi yang dilakukan sangat radikal, yaitu dengan melakukan aksi balas dendam dengan membunuh tentara-tentara Khmer Merah yang kejam, melakukan demonstrasi serta menyebarkan selebaran ke berbagai daerah yang isinya menginginkan pemerintah adanya pergantian kekuasaan.</p>
<p>Pengalaman Belajar</p>	<p>1. Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apersepsi</li> </ul> <p>Guru memotivasi siswa dengan berbagai pertanyaan mengenai materi yang bersangkutan sebagai pengantar sebelum masuk ke materi. Pertanyaan itu berupa pre test, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di benua manakah letak negara Kamboja?</li> <li>2. Apa yang anda ketahui tentang kelompok Khmer Merah?</li> </ol>

	<p>3. Apa yang dimaksud dengan ajaran komunis?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian Tujuan Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.</li></ul> <p>2. Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientasi Siswa membaca buku paket yang telah dimiliki dilanjutkan dengan penjelasan yang diberikan oleh guru.</li><li>• Latihan Siswa dibentuk kelompok kecil yang berisi 4 siswa untuk membahas permasalahan yang diberikan oleh guru berdasarkan pada indikator yang akan dicapai, permasalahan yang dibahas oleh kelompok yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Deskripsikan proses munculnya Pol Pot dalam pemerintahan Kamboja!</li><li>b. Jelaskan usaha-usaha atau langkah yang diambil Pol Pot dalam menjalankan pemerintahan di Kamboja!</li><li>c. Deskripsikan akhir dari pemerintahan Pol Pot yang berhubungan dengan banyaknya reaksi yang muncul!</li></ol></li><li>• Umpan Balik<ol style="list-style-type: none"><li>a. Secara kelompok siswa menyampaikan hasil diskusi dilanjutkan dengan tanggapan dari siswa dan guru mengenai hasil diskusi tersebut.</li><li>b. Guru memberi penegasan dan tambahan yang diperlukan terhadap hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa</li></ol></li></ul> <p>3. Tindak Lanjut</p> <p>Hasil diskusi rapat pleno tersebut dirangkum oleh siswa untuk dijadikan porto folio dan dikumpulkan kepada guru.</p>
--	---

	<p>4. Penutup</p> <p>a. Guru merangkum inti pelajaran yang telah disampaikan</p> <p>b. Guru memberikan tugas rumah berupa klipng mengenai hubungan luar negeri antar negara.</p>
<p>Sumber</p>	<p>Arief Budiman, Teori Negara, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002</p> <p>Arifin Bey, Dari Sun Yat Sen Sampai Mao Tse Tung, Jakarta, Tinta Mas, 1953</p> <p>Craig Etcson, The Rise and Demise Of Democratic Campuchea, Colorado, West View Press, 1984</p> <p>Hulsebos, Komunis, Pengaduan, Djandji atau Antjaman?, Jakarta, Pembangunan Jakarta, 1955</p> <p>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung Sinar Baru</p> <p>William Ebenstein dan Edwin Fogelman, Isme-Isme Dewasa ini, Jakarta, Erlangga, 1987</p> <p>Kompas 25 April 1978</p> <p>Merdeka 14 Mei 1979</p> <p>Sinar Harapan 14 Juni 1979</p>



B. Penilaian hasil Belajar

Alat penilaian : tes

Bentuk tes : Essei berstruktur

Butir-butir tes:

1. Deskripsikan proses munculnya Pol pot dalam pemerintahan di Kamboja!
2. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan Pol Pot dalam menjalankan pemerintahannya!
3. Deskripsikan akhir pemerintahan Pol Pot yang berhubungan dengan banyaknya reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri!

C. Portofolio

Membuat intisari atau ringkasan berdasarkan penjelasan gueru dan hasil diskusi mengenai Pemerintahan Pol Pot di Kamboja.

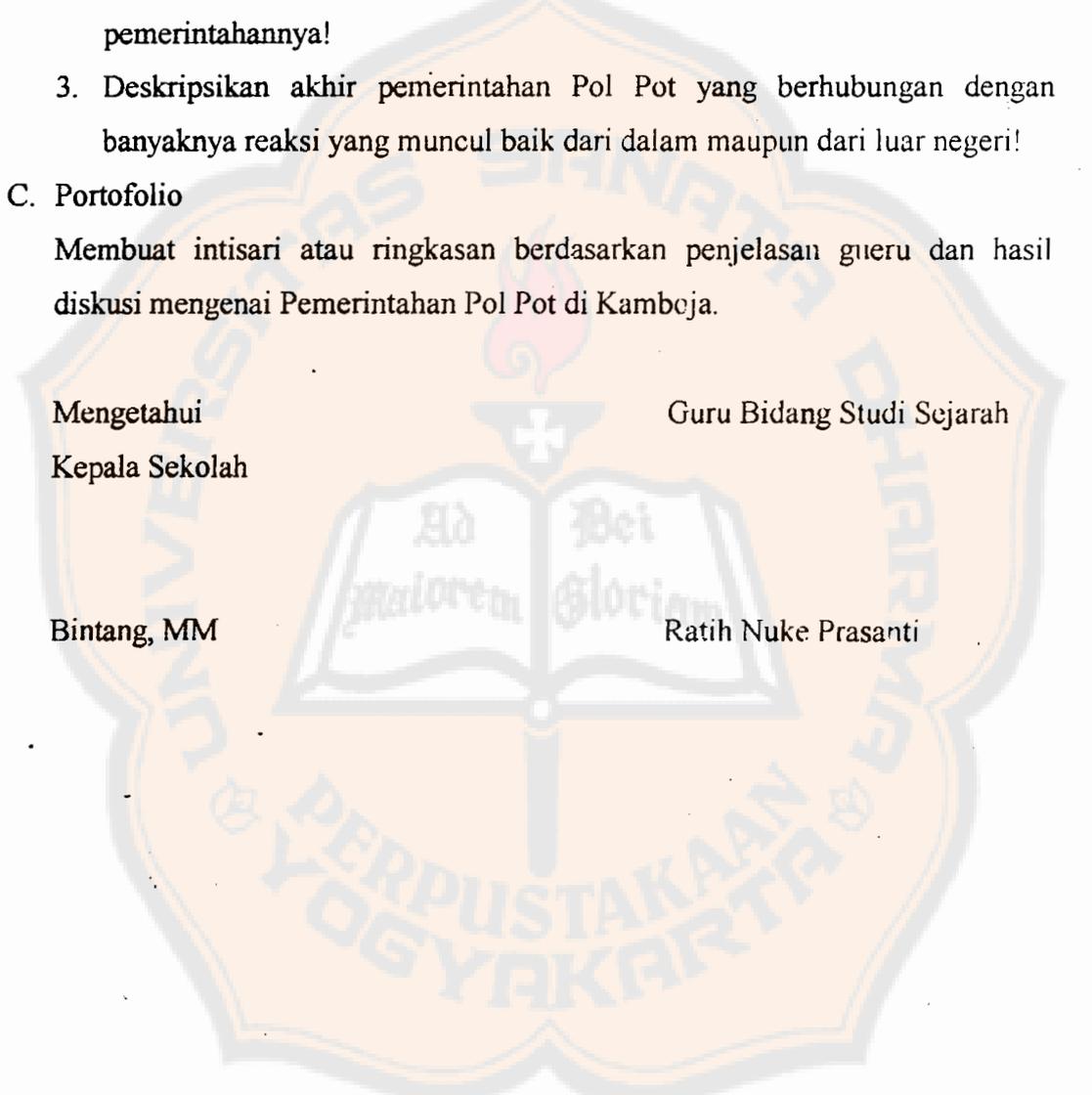
Mengetahui

Kepala Sekolah

Bintang, MM

Guru Bidang Studi Sejarah

Ratih Nuke Prasanti





Pol Pot, 1975-1979